



Volume 1 No 2 | Juni 2016

mediaBPP

Jendela Informasi Kelitbangan

KIPRAH BPP DAERAH

BPP DAERAH

**BPP PROVINSI RIAU
BALITBANGNOVDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**



<http://litbang.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
ISSN 2503-3352

JANGAN LUPA!

LAKUKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DAN JENTIK.



Nyamuk Aedes Aegypti penyebab Demam Berdarah Dengue ada di sekitar kita!

LAKUKAN DENGAN 4M

1. MENGURAS

MENGURAS WADAH SEPERTI BAK MANDI, TEMPAYAN, EMBER VAS BUNGA, TEMPAT MINUM BURUNG, PENAMPUNG AIR KULKAS AGAR TELUR DAN JENTIK MATI

2. MENUTUP

MENUTUP RAPAT SEMUA WADAH AIR AGAR NYAMUK TIDAK DAPAT MASUK DAN BERTELUR

3. MENGUBUR

MENGUBUR ATAU MEMUSNAHKAN SEMUA BARANG BEKAS YANG DAPAT MENAMPUNG AIR HUJAN SEPERTI BAN BEKAS, KALENG BEKAS, PECAHAN BOTOL AGAR TIDAK MENJADI SARANG DAN TEMPAT BERTELUR NYAMUK

4. MEMANTAU

MEMANTAU SEMUA WADAH AIR YANG DAPAT MENJADI TEMPAT NYAMUK BERKEMBANG BIAK

Pasca lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan terciptanya BPP Daerah dalam bentuk klasifikasi tipe A, B, dan C, belum terdengar kabar baik dari penguatan eksistensi BPP di daerah. Ego sektoral dan minimnya penguatan daerah masih terasa betul. Bahkan banyak BPP Daerah justru bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian lain, bukan Kementerian Dalam Negeri sebagai induk mereka. Terutama dalam hal pembangunan iptek, sains, dan pertanian.

Upaya meningkatkan peran dan eksistensi BPP Kemendagri dirasa belum mampu memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan BPP di daerah. Tidak bisa disangkal, banyak kepentingan di balik desakan penghapusan pengklasifikasian dan persyaratan pendirian BPP tersebut. Penyamaraan BPP juga dijadikan jalan mudah untuk mengisi kekosongan jabatan. Sebab, pembentukan BPP akan menambah struktur, anggaran, alokasi dana yang akan semakin membesar.

Namun, dari sekian fakta kurang baik tersebut masih ada beberapa BPP Daerah yang terus berkembang, berinovasi, dan memajukan daerahnya masing-masing dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Beberapa di antaranya juga terus berbenah diri mempersiapkan segala penilaian yang bersandar pada ketentuan berlaku, demi terwujudnya Badan

bertipe A atau B bukan C.

Muncul sejumlah kisah sukses BPP di daerah yang berhasil menunjukkan kinerja yang baik menjadi pengawal inovasi, pelayanan publik, dan pembinaan terhadap inovator. Cerita sejumlah kisah sukses tersebut kami tuangkan dalam Laporan Utama edisi Juni kali ini, dengan menghadirkan tiga BPP di daerah. Yakni, BPP Provinsi Riau, Balitbangnovda Sumatera Selatan, dan Bidang Litbang Bappeda Sumatera Barat.



Pada perjalanan peliputan 9 Mei 2016 lalu, kami sengaja memilih ketiga BPP Daerah tersebut, karena memunyai nomenklatur dan jenis BPP yang berbeda. Yakni BPP yang sudah maju, BPP yang sudah mandiri, dan BPP yang sedang berkembang. Dari ketiganya, kami mendapatkan berbagai jawaban bagaimana kinerja, eksistensi, dan kiprah BPP Daerah di tengah keterbatasan dan masalah tersebut.

Ada semangat yang menggebu yang mereka tunjukkan melalui program-program luar biasa.

Mereka ingin menunjukkan bahwa daerah juga dapat maju dan berkembang sebagai sumbangsih kemajuan bangsa secara bersama-sama.

Redaksi

mediaBPP

Diterbitkan oleh
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Media BPP menerima Opini dan Surat Pembaca. Kirimkan Opini dan Surat Pembaca Anda melalui surel kami ke alamat di bawah ini.

Alamat Redaksi
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
media.bppkemendagri@gmail.com

PELINDUNG	MENTERI DALAM NEGERI Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB	Domoe Abdie
PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Rochayati Basra Indrajaya Ramzie
PENYUNTING	Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy Niyan Nurin Ridha Putri
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	Elpino Windy M. Saidi Rifky

Kemendagri Hapus Perda Bermasalah

Seperti diwartakan, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3.143 peraturan daerah (perda). Perda yang dihapus hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi, dan masalah perizinan. Saya sangat mengapresiasi penghapusan perda tersebut karena sudah sejalan dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 251 Ayat 1-3 yang menyebutkan, perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian dibatalkan oleh menteri. Penghapusan perda bermasalah itu senyatanya berdampak positif untuk perekonomian. Program pembangunan pemerintah pusat dan daerah akan berjalan optimal. Ekonomi biaya tinggi yang membebani dunia usaha tentu akan berkurang secara signifikan.



Elpino Windy
Staf Bagian Umum BPP Kemendagri

Terima kasih Sdr. Elpino atas komentarnya. Redaksi juga berharap, apa yang telah dilakukan Kemendagri terkait penghapusan perda bermasalah itu dapat segera menggerakkan roda ekonomi di daerah yang pada gilirannya mampu menaikkan daya beli masyarakat.

Redaksi

Suplemen untuk Pegawai



Di Poliklinik BPP Kemendagri sebenarnya menyediakan vitamin atau suplemen untuk seluruh pegawai. Namun seringkali yang memanfaatkan kesempatan itu hanya beberapa orang dan orangnya itu-itulah saja. Seperti pegawai yang banyak bekerja dengan aktivitas fisik. Padahal, bagi pegawai yang baru saja dinas ke luar kota, bisa juga mampir ke klinik untuk penyembuhan atau mengembalikan stamina. Kenapa sebulan sekali? Karena kami ingin penyebarannya secara merata agar seluruh pegawai juga bisa merasakan fasilitas yang sudah dianggarkan. Fungsi poliklinik bukan hanya untuk pengobatan saja, melainkan juga untuk pencegahan, karena mencegah lebih baik dari mengobati.

drg. Myrna Sari
Dokter Gigi Poliklinik BPP Kemendagri

Vitamin dan suplemen yang sudah ada di BPP Kemendagri memang diberikan secara gratis untuk menunjang kesehatan para pegawai.

Sebelumnya, redaksi Media BPP sudah pernah memberitakan informasi ini pada portal kami di litbang.kemendagri.go.id dan juga di rubrik Aktivitas MediaBPP pada edisi Februari 2016. Memang sangat disayangkan kalau fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh kebanyakan pegawai. Semoga informasi dari drg. Myrna di atas menambah kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan dengan cara mencegah penyakit dan menjaga sistem imun agar lebih kebal terhadap virus dan bakteri

Redaksi

Kemana Hasil Penelitian?

Sudah menjadi strategi BPP Kemendagri dan Daerah membuka kesempatan pada semua peneliti menyelenggarakan program penelitian. Tentunya telah dihasilkan banyak sekali laporan penelitian. Akan tetapi, hasil penelitian itu tidak disiarkan ke mana-mana. Belum lagi hanya sedikit yang diterbitkan untuk diketahui publik terutama masyarakat, alhasil kita tidak mengetahui perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di negeri kita. Kemana hasil penelitian peneliti kita? Atau mungkin dipublikasikan sangat terbatas dan hanya untuk memenuhi angka kredit. Di negara lain seperti negara tetangga Malaysia dan Singapura, karya ilmiah diterbitkan dan diterapkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh publik. Penerbitan hasil karya ilmiah itu bukan hanya menjadikan kita tahu siapa bergelar apa, melainkan dapat mengetahui seberapa besar bangsa ini untuk menjadi besar.

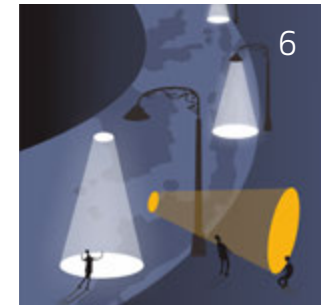


Bungaran Damanik
JFU Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi BPP Kemendagri

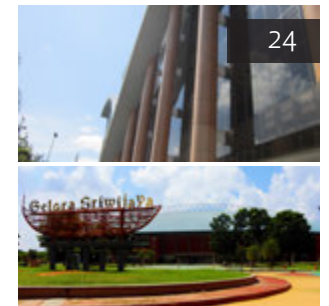
Hasil penelitian memang banyak dituangkan dalam jurnal ilmiah yang saat ini masih menjadi acuan dan bukti bahwa seorang peneliti benar-benar melakukan penelitian. Namun memang benar, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dilakukan jika sudah diterbitkan dalam jurnal? Bagaimana implikasi terhadap masyarakat? Rasanya hal itu masih sangat jauh sekali dalam cita-cita penelitian Indonesia. Kegelisahan dan gambaran jawaban tersebut, mungkin bisa Sdr. Bungaran lihat pada rubrik Laporan Utama dan Opini kami yang ditulis oleh Heriyandi Rony (Peneliti BPP) tentang berbagai permasalahan peneliti dan juga BPP sebagai wadah para peneliti.

Redaksi

3	PENGANTAR & SUSUNAN REDAKSI
4	SURAT PEMBACA
6	LAPORAN UTAMA
9	Kiprah BPP di Daerah
10	BPP Provinsi Riau: Berkembang dalam Keterbatasan
12	BPP Provinsi Riau: Dari Ikan hingga Nanas
14	Bidang Litbang Bappeda Sumbar: Terus Bergerak Menjadi BPP
15	Balitbangnovda Sumsel: Iptek untuk Rakyat
	Menjawab Persoalan RPP OPD
17-21	AKTIVITAS
22-23	JEPRET
24	DAERAH
26	PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
	Arsitektur Terbaik Se-Asean
26	MENGUNJUNGI JAKABARING SPORT CITY
	Keelokan Gelanggang di Ujung Palembang
28	KOMIK - Masa Depan e-KTP (Bang Pepe)
	Gaya HIDUP
29	Fanny Fabriana - Mudik Menyenangkan bersama Keluarga
30	Puasa Yuk Nak!
	PROFIL BPP DAERAH - Balitbangnovda Provinsi Sumsel
32	Menciptakan Peluang di Tengah Kelesuan
34	Saatnya Condong ke Inovasi Teknologi
	PROFIL BPP DAERAH - BPP Provinsi Riau
36	Terus Berkembang untuk Inovasi Daerah
38	Program Unggulan Science Techno Park Siap Memajukan SDA Riau
40	KILAS BERITA
	Jalan Panjang Revisi UU Pilkada
	RESENSI
42	BUKU: Merevolusi Pancasila
44	Film: Kisah Cinta Masa Muda BJ. Habiebie
46-47	JEPRET
48	LEBIH DEKAT
	Yenny Soetjipto "Menjadi Peneliti Tidak Harus Linier"
	SASTRA
50	Mirah Delima Bang Amat
	OPINI
54	Litbang dan Peranannya terhadap Daerah
56	Mengurai Benang Kusut Tanah Perbatasan
	CATATAN
58	Ruang Gerak Calon Perseorangan



LAPORAN UTAMA
 Kiprah BPP di Daerah



DAERAH

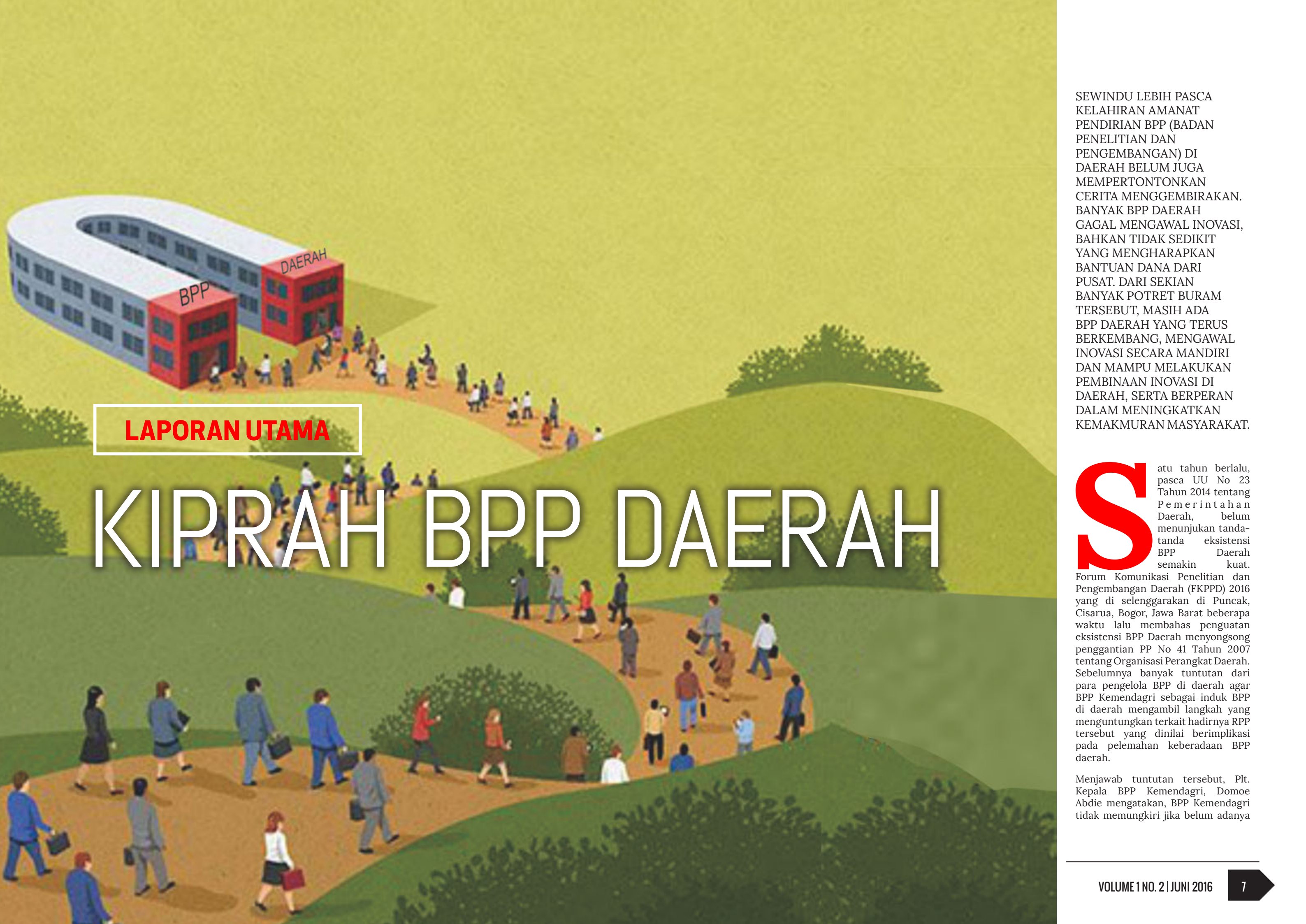


OPINI

Mengurai Benang Kusut Tanah Perbatasan



GAYA HIDUP
 Puasa Yuk Nak!



LAPORAN UTAMA

KIPRAH BPP DAERAH

SEWINDU LEBIH PASCA KELAHIRAN AMANAT PENDIRIAN BPP (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) DI DAERAH BELUM JUGA MEMPERTONTONKAN CERITA MENGGEMBIRAKAN. BANYAK BPP DAERAH GAGAL MENGAWAL INOVASI, BAHKAN TIDAK SEDIKIT YANG MENGHARAPKAN BANTUAN DANA DARI PUSAT. DARI SEKIAN BANYAK POTRET BURAM TERSEBUT, MASIH ADA BPP DAERAH YANG TERUS BERKEMBANG, MENGAWAL INOVASI SECARA MANDIRI DAN MAMPU MELAKUKAN PEMBINAAN INOVASI DI DAERAH, SERTA BERPERAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT.

Satu tahun berlalu, pasca UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum menunjukkan tanda-tanda eksistensi BPP Daerah semakin kuat. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) 2016 yang di selenggarakan di Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu membahas penguatan eksistensi BPP Daerah menyongsong penggantian PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebelumnya banyak tuntutan dari para pengelola BPP di daerah agar BPP Kemendagri sebagai induk BPP di daerah mengambil langkah yang menguntungkan terkait hadirnya RPP tersebut yang dinilai berimplikasi pada pelemahan keberadaan BPP daerah.

Menjawab tuntutan tersebut, Plt. Kepala BPP Kemendagri, Domoe Abdie mengatakan, BPP Kemendagri tidak memungkir jika belum adanya

'BPP *Minded*' di daerah. Sehingga beberapa daerah masih menganggap, jika BPP merupakan lembaga yang belum penting.

"BPP masih dianggap belum penting oleh beberapa daerah, dan menjadi urusan yang kesekian. Mereka lebih mengutamakan pembentukan semacam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau perangkat lain ketimbang BPP," tutur Domoe.

Menurut Domoe, BPP harus memunyai strategi baru di antaranya dengan merevitalisasi pola pikir (*mindset*) tentang BPP. Sebenarnya BPP sebagai lembaga riset dengan SDM profesional, dalam bidang strategi sosial atau politik, teknologi, dan sebagainya (*think tank*), dapat menciptakan daerah inovatif. Hal ini harus benar-benar menjadi prioritas kepala daerah maupun DPRD. BPP pun dituntut menjadi lembaga *money follow function* (di mana pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja), serta diharapkan bisa menjadi lembaga yang kaya fungsi.

Upaya meningkatkan peran dan eksistensi BPP di daerah wajar ditempuh BPP Kemendagri. Namun berdirinya BPP seperti yang diamanatkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbukti belum mampu memberi manfaat yang besar bagi keberlangsungan BPP. Ditambah lagi adanya klasifikasi persyaratan BPP dalam pengganti PP tentang OPD yang dalam waktu dekat akan segera diresmikan dirasa memberatkan.

Tidak bisa disangkal, banyak kepentingan di balik desakan penghapusan pengklasifikasian dan persyaratan pendirian BPP tersebut. Penyamarataan BPP juga dijadikan jalan mudah untuk mengisi kekosongan jabatan. Sebab, pembuatan BPP akan menambah struktur organisasi, alokasi dana juga akan semakin besar.

Kurangnya perhatian BPP Kemendagri juga disebut-sebut menambah asumsi BPP daerah miskin fungsi. Masih adanya BPP yang berada di bawah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menunjukkan BPP di daerah masih dipandang sebelah mata.

Akan tetapi, eksistensi BPP di bawah Bappeda tidak serta merta hanya menjadi sebuah lembaga tanpa manfaat. Bidang Litbang Sumatera Barat misalnya, mereka berperan dalam pembangunan di daerahnya. Bidang Litbang Sumbar juga memosisikan lembaganya dengan porsi program kelitbangan yang besar. Tercatat, mereka memiliki banyak peneliti dan produk kelitbangan yang *mumpuni*.

Di lain pihak, banyak BPP di daerah yang hanya sekedar memenuhi kewajiban pendirian SKPD. Misalnya, masih ditemukannya BPP yang sudah lama berdiri dan tidak memiliki fungsional peneliti, BPP juga tidak menghasilkan produk kelitbangan, seperti minimnya hasil kajian dan regulasi. Sebagai badan yang berdiri sendiri, BPP juga tidak memiliki produk publikasi ilmiah sebagai wadah aktualisasi peneliti, untuk menyampaikan gagasan dan kenaikan angka kredit.

Dari beberapa hal tersebut, tidak heran jika kemudian banyak BPP di daerah menaruh rasa hormat terhadap kementerian lain selain BPP Kemendagri utamanya, yang lebih menganggap keberadaan lembaganya, bahkan tidak jarang memberikan bantuan dana, pelatihan, dan pengembangan.

Dari sederet potret buram tersebut, muncul sejumlah kisah sukses BPP di daerah. Beberapa BPP Daerah tersebut menunjukkan kinerja yang baik menjadi pengawal inovasi, pelayanan inovasi publik, dan pembinaan terhadap inovator. BPP Daerah tersebut tumbuh dan berkembang tanpa ketergantungan terhadap BPP Kemendagri dan berhasil mencetak para inovator dan pengusaha baru di daerahnya. (MSR)



Jarum jam menunjukkan angka pukul 03.00 pagi, Tim Media BPP sudah bergegas menuju Bandara Soekarno Hatta pada Mei 2016 lalu untuk terbang ke Pekanbaru, Palembang, dan Padang.

Tim ke sana untuk menggali informasi tentang eksistensi dan kiprah Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah itu.

BPP di Kota Madani

Melalui perjalanan kurang lebih tiga jam, dari jadwal yang seharusnya dua jam membuat kami sedikit lelah dan mengantuk. Selama satu jam di pesawat berputar-putar di langit Riau. Pesawat yang kami tumpangi tidak berani turun akibat banyak kabut menutupi pandangan mata. Pilot pesawat berulang kali memberikan peringatan akan segera mendarat untuk yang ketiga kalinya, namun gagal juga. Baru pada peringatan keempat pesawat kami berani turun untuk mendarat.

Di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau kami sudah dijemput oleh salah satu peneliti di sana. Gevisioner namanya, pria berkumis tebal dan logat khas Melayunya yang begitu kental menyambut kami dan mendampingi kami selama tiga hari di Riau. "Bagaimana perjalanannya tadi? Lancar? Ngomong-ngomong kita mau ke mana dulu?" tanyanya.

Kami memang sudah berencana untuk terlebih dahulu mengunjungi BPP Provinsi Riau begitu tiba di Pekanbaru. Di sana, Gevi, begitu ia dipanggil, langsung mengajak kami ke ruangan yang di atas pintunya bertuliskan "Ruang Kepala Badan". Kami lantas bertemu dengan Arbaini, perempuan yang sudah setahun memimpin BPP Riau itu.

Perempuan berjilbab dengan mata sipit dan pipi gempal itu sedikit banyak bercerita tentang lembaga yang telah dipimpinnya. "BPP ini sebenarnya berdiri sejak 2001, jadi sudah 15 tahun berdiri," kata Arbaini.

Setidaknya ada tiga Perda yang menjadi landasan badan ini berdiri, yakni berdasarkan Perda Provinsi Riau No 25 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, lalu ada Perda No 8 Tahun 2008, dan terakhir diubah kembali melalui Perda No 3 Tahun 2014, tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. "Kami akhirnya memisahkan diri dari Bappeda sebagai badan yang memang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan," katanya.

Namun sayangnya, keberadaan BPP Riau sebagai anak dari BPP Kemendagri itu, dirasa Arbaini masih belum optimal dalam hal pengembangan. BPP Daerah kebanyakan hanya berkembang pada tugas pokok dan fungsi penelitian. "Jadi yang berperan hanya Lit-nya, Bang-nya belum berkembang. Seharusnya kan Litbang (Penelitian dan Pengembangan). Tetapi selama ini hasil penelitian kita hanya sebatas penelitian. Pengembangannya menjadi bukan kewenangan kami lagi," terangnya.

Dengan logat Melayu yang khas, Arbaini berharap suatu ketika BPP Kemendagri dapat berperan dalam penunjang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BPP Daerah untuk mengembangkan hasil penelitiannya, utamanya BPP yang dia pimpin di kota yang disebut Kota Madani tersebut. "Jangan sampai tugas kita menjadi tumpang tindih dengan tupoksi lain. Karena kita yang meneliti, kita yang menjalankan, jangan orang lain yang mengembangkan hasil penelitian kita," ungkapnya. (IFR)

BPP Provinsi Riau

DARI IKAN HINGGA NANAS

Terik matahari terasa begitu panas di kulit. Pusat kota masih diramaikan tempat perbelanjaan dan rekreasi. Kendaraan berplat BW hilir mudik di jantung ibu kota Riau. Kami bergegas menuju STP (*Science Techno Park*) yang berada di kawasan Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Jalan mulus aspal kami rasakan di perjalanan. Sepanjang kanan dan kiri terlihat pemandangan kelapa sawit dan gambut. Baru lima menit perjalanan, kami sudah disuguhi pemandangan jalanan yang sepi, beraspal, dan panas. Hanya beberapa mobil bak terbuka pengangkut hasil kelapa sawit atau barang-barang dari luar kota yang kami jumpai.

Perjalanan begitu lancar, tidak ada macet yang kami rasakan. Hanya saja, jika jendela mobil sedikit dibuka, terik matahari akan langsung terasa begitu kuat. “Di Riau ini panas, karena atas bawahnya minyak. Di bawah ada minyak, di atas ada minyak kelapa sawit,” ungkap Dam Supriyadi, staf BPP Riau yang mengendarai mobil yang kami tuju.

Tiba-tiba mobil yang kami tumpangi itu membelok masuk ke dalam lahan seluas 30 hektar dengan gerbang berkarat. “*Tittidin..*” suara klakson dibunyikan menandakan mobil minta dibukakan gerbang. Seketika petugas di dalam langsung membukakan gerbang, mobil kami masuk dalam lahan bertuliskan “STP Puribangtek” (Pusat Riset Pengembangan dan Teknologi) salah satu program BPP Riau yang menjadi andalan.

Berbekal informasi dari Arbaini, BPP Riau memang fokus pada STP Puribangtek yang sudah berjalan sejak 2005 itu. “Programnya sudah mulai berjalan sejak tahun kemarin. Apalagi ada dukungan dari Kemenristek. Ada sembilan yang direncanakan Kemenristek terkait STP ini, namun hanya lima yang disetujui. Salah satunya BPP Riau,” terangnya.

Diakui Arbaini, dalam hal pembangunan Kemenristek memang sangat membantu masalah pendanaan, namun untuk hal penunjang seperti gaji pegawai dsb, masih di bawah naungan BPP Daerah atau APBD. “Dana khusus dari kami kemarin ada sekira 1,7 milyar yang kami gunakan juga untuk membuat pagar mengelilingi 3 hektar, gaji dan tunjangan peneliti,” paparnya.

Sementara terkait personil pengelola, BPP Riau

mengaku masih *m e n g g u n a k a n* pihak ketiga seperti mengajak 150 mahasiswa UNRI (Universitas Riau) untuk pengelolaan ikan. “Tenaga dari kita, tapi *skill* itu dari mereka. Namun yang menggawangi masih dari pihak kami. Saya (Kepala Badan-*red*) menunjuk orang untuk yang bertanggung jawab, tapi secara sistem pekerjaan kami berkerja secara bersama-sama,” terangnya.

Di STP kami menjumpai pabrik biodiesel kelapa sawit dalam tabung besar berwarna biru terpampang di atas. Di dekatnya juga ada penangkaran ikan air tawar seperti ikan lele yang katanya dapat hidup dengan memanfaatkan air rawa. Menurut Arbaini, setidaknya memang ada empat hal yang menjadi fokus penelitian di STP tersebut.

Pertama, fokus pada budidaya ikan. Meskipun Riau diapit oleh daratan, dan tidak ada laut, mereka mampu mengelola ikan menjadi berbagai hal, baik itu ikan air laut maupun ikan air tawar. Dalam STP ini kami menjumpai ikan patin dalam kaleng kemasan yang bertuliskan “Pindang Patin Khas Riau”. Selain itu, ikan juga dikelola dalam bentuk kerupuk dan selai. “Ampasnya juga kami buat selai. Kami bekerja sama dengan Universitas Riau dan UMKM, kami memang berencana memajukan ekonomi kreatif Riau,” ungkapnya.

Tidak hanya ikan, di Riau kaya akan pohon kelapa-nya. Setidaknya, setiap kabupaten di Riau ada 400 ribu hektar pohon kelapa yang dikelola oleh beberapa pabrik milik masyarakat setempat. Mereka mengelola kelapa mulai dari dagingnya, air, hingga serabut. “Kita buat *nata de coco*, air kelapa dalam kemasan, dan *cocopeat* (sabut kelapa) yang kami gunakan untuk media tanaman hidroponik,” selorohnya.

Selain ikan dan kelapa, di Riau juga kaya akan tanaman Sagu. Ada 38 ribu hektar tanaman sagu yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Meranti,



Bengkalis, dan Indragiri. Sagu tersebut mereka kelola menjadi aneka bahan makanan lainnya, bahkan Arbaini berencana menjadikan sagu sebagai pengganti makanan pokok penduduk Riau. “Sejauh ini sudah ada mie sagu, tepung sagu, dan kue sagu. Namun sayangnya untuk kue sagu dan gula sagu belum menjadi industri,” paparnya.

Terakhir, mereka juga fokus pada buah nanas. Aneka nanas ditanam penduduk Riau di pinggir jalan. Rupanya nanas memang mudah tumbuh dekat area kelapa sawit. Berbagai ukuran nanas, mulai dari nanas madu, nanas yang besar, kecil ada semuanya di Riau. “Bahkan kami memasok nanas ke Jakarta,” imbuhnya.

Bola panas BPP Riau

Mimpi indah untuk membangun maju STP Puribangtek tidak akan terjadi, jika penetapan status BPP Provinsi Riau berubah menjadi Badan bertipe C. Nasib STP Puribangtek dan berbagai program unggulan BPP Riau bergantung pada penetapan penilaian klasifikasi BPP bertipe A, B, atau C yang dituangkan dalam aturan baru.

Aturan tersebut diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 209 dan

219 mengamanatkan untuk segera membentuk BPP berdasarkan tipe A, B, dan C, yang penilaiannya berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan perda yang dihasilkan, bukan dari program apa saja yang sudah terbentuk.

Sebagai pemimpin di sana, tentu rasa khawatir menyelimuti Arbaini dan personilnya. “Kalau misalnya berdasarkan jumlah perda yang masih berlaku, saya rasa semua BPP Daerah akan menjadi tipe C semua, tidak hanya Riau. Karena urusan Perda itu sebenarnya menjadi urusan DPR dan pemerintah daerah, kami hanya menyumbang naskah akademik berdasarkan riset,” tegasnya.

Arbaini mengaku, pasal tersebut semestinya mempertimbangkan soal kualitas kerja yang selama ini BPP Daerah lakukan. Mengingat pihaknya juga sedang fokus dengan STP yang menjadi program andalannya. “Kalau ini jadi tipe C, maka saya tidak tahu lagi bagaimana nasib STP, karena pasti anggarannya juga berbeda, personil (kepala bagian-*red*) dipersempit,” katanya sambil khawatir.

Belum lagi, permasalahan kurangnya terjalin komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah setempat dengan BPP Riau. Seperti menjalankan program kerja penelitian, terkadang Gubernur Riau tidak memiliki kesamaan visi dan misi dengan apa yang sudah dirancang BPP Riau.

Menurut Ibrahim Suriawan, Kepala Bidang Iptek BPP Riau, pihaknya merasa serba salah. “Jadi kami seperti memegang bola panas, gubernur meminta penelitian A, sementara kami punya program B, sehingga tidak ada kepakaran yang *mumpuni*. Yah persis membawa bola panas, mau dipegang kepanasan, tidak dipegang nanti tidak sampai programnya ke masyarakat,” keluhnya.

Pria yang suka memakai gamis dengan peci itu mencontohkan, seperti permintaan gubernur untuk melaksanakan program penelitian kebakaran gambut yang sempat menimbulkan asap dan bencana Riau. Di BPP, tidak ada kepakaran di bidang gambut. “Untuk itu kami bekerja sama dengan pihak lain,” terangnya dalam perbincangan kami dengan tujuh peneliti lainnya di Ruang Kepala Badan.

Kekurangan personil tersebut itu juga yang akhirnya membuat penelitian STP *mangkrak* begitu saja, terakhir kami mengunjungi kondisinya sangat memprihatinkan. Alat-alat penunjang penelitian terbengkalai, dipenuhi sarang laba-laba, produk-produk yang dihasilkan hanya berupa pajangan yang disimpan dalam lemari kaca dan dibiarkan kadaluarsa begitu saja. “Inilah sayang sekali, kami kekurangan SDM dan juga dana. Makanya STP hanya hidup jika ada kegiatan saja,” sesal Ibrahim. (IFR)



BIDANG LITBANG BAPPEDA SUMBAR

TERUS BERGERAK MENJADI BPP

Selain mengunjungi BPP Riau dan Balitbangnovda Sumsel, tim Media BPP juga mengunjungi Bidang Litbang Bappeda Sumatera Barat. Di sana kami langsung disambut oleh Kepala Bidang Litbang Siti Latifah.

Berbeda dari kedua BPP yang tim kami kunjungi, Bidang Litbang Sumbar ini masih menjadi satu dengan Bappeda. “Pada 1980, bidang penelitian merupakan salah satu bidang pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan eselon III,” kata Latifah mulai bercerita.

Baru kemudian pada 2000 lahir Otonomi Daerah, sehingga pada 2001-2008 Bidang Penelitian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjadi lembaga Litbang setara dengan eselon II, yaitu sebagai BPP Provinsi Sumatera Barat. “Selanjutnya pada 2009, setelah adanya revisi PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka BPP Provinsi Sumatera Barat dilikuidasi dan menjadi satu bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan di bawah Bappeda Provinsi Sumatera Barat atau setara dengan eselon III, yang berlaku sampai saat ini. Dengan kinerja dan tupoksi yang sama antara kelembagaan litbang sebagai bidang maupun sebagai badan,” kata perempuan berkacamata itu.

Meski begitu, Bidang Litbang Bappeda Provinsi Sumatera Barat, telah menyiapkan diri untuk menjadi Badan sejak awal 2012, diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengamanahkan untuk membentuk BPP di daerah serta adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No 36 dan Menteri Riset dan Teknologi No 3 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah, yang mengamanahkan beban inovasi daerah kepada lembaga kelitbang di daerah. “Kami juga telah mempersiapkan naskah akademik untuk pembentukan Badan Litbang ini. Konsep pengusulan sudah sampai kepada Biro Organisasi Setda Kantor Gubernur,” imbuhnya.



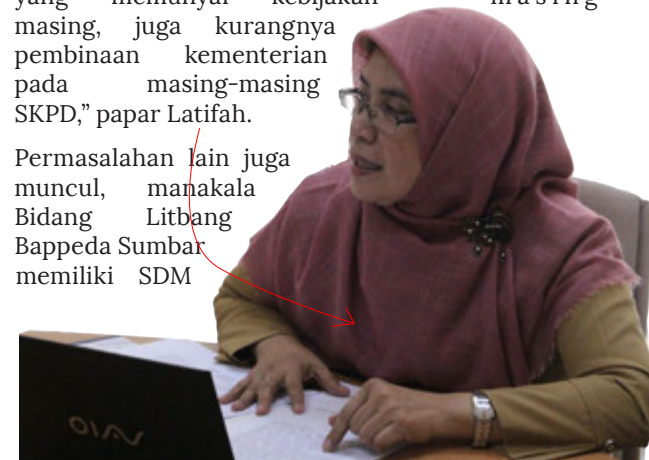
Gedung Bappeda Provinsi Sumbar

Terhambat PP OPD dan SDM

Namun sayangnya, cita-cita untuk melebur sendiri menjadi BPP Sumatera Barat harus tertunda karena menunggu revisi PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sampai saat ini masih digodok. “Jadi kalau ditanya siap atau tidak menjadi Badan, kami sangat siap untuk menjadi BPP, apalagi telah diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014,” tegasnya.

Selain permasalahan menunggu revisi PP No 41 Tahun 2007 tersebut, Bidang Litbang Bappeda Sumbar juga mengalami kesulitan menyetarakan menjadi eselon II khususnya dalam bidang kebijakan dan program terkait inovasi daerah. “Karena di kami juga pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengelola inovasinya masih terdapat ego sektoral yang menyuyai kebijakan masing-masing, juga kurangnya pembinaan kementerian pada masing-masing SKPD,” papar Latifah.

Permasalahan lain juga muncul, mahakala Bidang Litbang Bappeda Sumbar memiliki SDM



Audiensi BPP Kemendagri bersama BPP Provinsi Sumbar

Peneliti terbatas. Di sana ada 6 orang peneliti dan satu calon peneliti. Mereka melakukan penelitian secara mandiri dan kerja sama. Ada beberapa program penelitian yang mengharuskan bekerja sama dengan pihak lain, dikarenakan keterbatasan kepakaran peneliti di sini.

Kendati begitu, hasil penelitian yang mereka lakukan bisa dibilang cukup membanggakan. “Penyebarluasan hasil penelitian di sini kami tuangkan melalui jurnal daerah maupun jurnal nasional, selain itu ada juga sosialisasi hasil penelitian kepada pengguna riset baik SKPD provinsi maupun SKPD kab/kota. Kami

ikut serta dalam simposium seminar dan lain-lain,” terangnya.

Produktivitas peneliti cukup menggembirakan bagi yang senior (peneliti madya), sementara produktivitas masih belum nampak untuk peneliti muda dan peneliti pratama yang sedang berkembang

Amunisi menjadi BPP

Meski banyak aral yang melintang, Latifah dan kawan-kawan terus berjuang demi mendirikan BPP tersendiri dan mendapatkan predikat yang baik (minimal tipe B). Beberapa kontribusi pun telah mereka lakukan, di antaranya hasil penelitian mereka menjadi salah satu bahan masukan untuk perumusan kebijakan, karena tema penelitian yang diusulkan berasal dari isu-isu strategis RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Kontribusi kami terhadap perumusan kebijakan di daerah cukup baik, karena kami selalu dilibatkan dalam penyusunan dokumen. Baik itu rencana jangka menengah, maupun rencana tahunan. Kami juga diakui sebagai penulis draf awal untuk pembuatan naskah akademik Perda RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada 2016-2021,” jelasnya.

Regulasi daerah yang sudah diterbitkan Bidang Litbang Bappeda Sumbar ada dua Perda, yaitu Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Perda No 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2010-2015.

Tidak hanya Perda, Bidang Litbang Bappeda Sumbar juga berhasil menelurkan dua peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 77 Tahun 2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015, dan Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan.

Selain menelurkan sejumlah rancangan Perda dan Pergub, beberapa inovasi juga dilakukan oleh Bidang Litbang Bappeda Sumbar ini. Salah satunya inovasi di bidang produk seperti industri hasil laut, industri cokelat, industri pakaian dan bordir, serta industri minyak atsiri. “Inovasi kami masih tersebar di masing-masing sektor dan kelembagaan penelitian baik di Perguruan Tinggi maupun di instansi vertikal yang ada di Sumatera Barat,” ungkap Yulfira Media, salah satu peneliti di Bidang Litbang Bappeda Sumbar.

Di bidang pemerintahan, mereka juga mampu mewujudkan inovasi, seperti *e-budgeting*/SIPKD, Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah), Simpeg (Sistem Informasi Penggajian), *e-musrenbang* (musyawarah rencana pembangunan), *e-procurement*, dan lainnya yang berbasis teknologi informasi. “Yang sedang dalam proses kami juga ada *e-planning*,” kata Yulfira. (IFR/FN/NNRP/EPW)

BALITBANGNOVDA SUMSEL

IPTEK UNTUK RAKYAT

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang ada di Selatan Pulau Sumatera ini memaksimalkan keunggulan sebagai provinsi penghasil ikan patin di Indonesia.

Inovasi, itulah kata yang kerap melekat dalam diri Balitbangnovda Sumsel. BPP yang menambahkan nama inovasi sejak 2011 ini, terus gencar memperkenalkan produk unggulan yang di milikinya di setiap event inovasi hingga ke seluruh Nusantara. Menurut Kabid Inovasi Balitbangnovda Sumsel Samsudin, seluruh jajaran Balitbangnovda berkomitmen tidak ingin hanya melanjutkan kesuksesan pemimpin sebelumnya. Mereka meski putar otak untuk membuat berbagai terobosan.

Capaian kinerja Balitbangnovda Sumsel terlihat dari beberapa produk unggulan yang dihasilkan oleh lebih dari 20 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Sumsel. Salah satu produk yang tengah dikembangkan untuk menjadi produk unggulan Provinsi Sumsel saat ini adalah olahan pindang patin dalam kemasan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sentra produksi perikanan, produksi ikan patin di Sumsel terbesar di Indonesia yakni mencapai 150 ribu ton per tahun.

“Sumsel pun menyumbang 60 persen produksi ikan patin yang ada di Indonesia, dukungan pemerintah juga terus digalakkan agar budidaya tersebut tidak hilang,” ujar Samsudin.

Dengan konsep Iptek untuk rakyat, Balitbangnovda bertindak sebagai intermediasor bagi para petani yang ada di Kabupaten Banyuasin. Berawal dari keinginan para pelancong yang hendak ke Sumsel untuk membawa pindang.

Oleh-oleh ikan pindang yang hanya dalam kemasan plastik, menjadi inisiatif Balitbangnovda untuk mengembangkan dalam kemasan kaleng yang tahan lama dan lebih rapi.

“Dengan begitu Pindang sekarang bisa dibawa ke mana-mana, tidak lagi dengan plastik, kalau memakai plastik kadang orang bawanya juga susah,” terang Samsudin.

Samsudin mengatakan, sentra produksi ikan patin yang berbeda di Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dari masyarakat yang memproduksi batu bata. Banyaknya lubang tanah bekas galian batu bata yang tergenang air, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk budidaya ikan patin. Namun, di sisi lain, melimpahnya ikan ternyata tidak serta merta menambah kemakmuran, meningkatnya pasokan ikan membuat harga ikan rendah sehingga perlu strategi baru agar hasil produksi ikan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Balitbangnovda Sumsel pun harus putar otak, hasilnya melalui inkubator teknologi ditemukan ide pengemasan ikan patin dalam kaleng.

Samsudin menambahkan, proses produksi ikan patin juga merupakan hasil kerja sama antara Balitbangnovda dengan LIPI Yogyakarta. Balitbangnovda Sumsel saat ini tengah mengupayakan produk tersebut memiliki

merek dagang, sehingga produk tersebut tidak hanya dipamerkan, tetapi bisa dipasarkan lebih luas. Namun, dalam segi pemasaran, Balitbangnovda Sumsel masih menemui kendala.

“Karena belum keluar merek dagang, maka produk tersebut tidak boleh dipasarkan, kendala lainnya adalah anggaran Balitbangnovda Sumsel yang terbatas. Sehingga tidak bisa membeli mesin produksi, seperti mesin untuk mensterilkan makanan,” ucap Samsudin.

Produksi ikan patin dilakukan sepenuhnya oleh UKM Sumsel yang menjadi binaan Balitbangnovda Sumsel. Pindang Patin tersebut juga rencananya akan dijual dengan harga 20 ribu/pcs.

“Terkait pemasaran produk Pindang Patin, bisa saja pada masa mendatang Balitbangnovda Sumsel bekerja sama dengan pengelola ibadah haji, agar setiap peserta mendapat produk tersebut untuk oleh-oleh ketika pulang kampung,” ungkap Samsudin.

Hadirnya produk tersebut pada masa mendatang diharapkan dapat menjadikan Sumsel sebagai sentra oleh-oleh ikan pindang yang bisa dikirim ke berbagai daerah di Indonesia.

Selain kemasan pindang patin, Balitbangnovda Sumsel juga tengah mengembangkan kemasan produk dari UKM lain seperti keripik durian, kopi, kerupuk/kemplang aneka rasa, terasi, dan sebagainya. Melalui Balitbangnovda Sumsel, produk kopi milik UKM binaan, saat ini tengah dipasarkan di supermarket seperti *carrefour* dan disandingkan dengan kopi-kopi terkenal.

Lebih lanjut menurut Samsudin, Iptek akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing produk, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan profesionalisme individu, dan meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian bangsa.

“Sama halnya dengan inkubator teknologi Sumsel, diharapkan bisa menghasilkan pengusaha berbasis teknologi, manfaat teknologi harus bisa dikembalikan kepada masyarakat, lebih tepatnya Iptek untuk rakyat,” tutup Samsudin.(MSR)



MENJAWAB PERSOALAN RPP OPD

BEBERAPA permasalahan dan ‘curhatan’ yang ada di BPP Daerah seperti yang terjadi pada tiga lokus yang kami kunjungi, turut mengundang pertanyaan besar. Apa tindakan BPP Kemendagri sebagai induk dari BPP Daerah?

Menjawab pertanyaan tersebut, sejatinya BPP Kemendagri sudah melaksanakan beberapa agenda besar untuk memperkuat kiprah dan eksistensi BPP Daerah selaku perwakilan daerah. Salah satu genda besar tersebut adalah Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14-16 Maret 2016 lalu.

Selain itu, sekira satu bulan lalu, BPP Kemendagri mengadakan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) 2016 yang diselenggarakan di Puncak, Cisarua, Bogor. FKPPD tersebut membahas penguatan eksistensi BPP Daerah menyongsong penggantian PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Teguh Narutomo, Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sisdu serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE), sebenarnya dalam FKPPD kemarin sudah hadir Dirjen Otda Kemendagri yang merumuskan RPP OPD pengganti PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. “Mereka bilang ke kami, tidak perlu risau dengan pengklasifikasian BPP bertipe A, B, atau C. Tetap ada Eselon II yang akan memimpin BPP Daerah,” terang Teguh saat ditemui Tim Media BPP di LAN Pejompongan, Kamis (26/06).

Namun kenyataannya tidak demikian. Dalam revisi PP OPD tersebut, masih ada pasal yang bermasalah dan tidak selaras dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah harus mendirikan BPP. “Ada pasal yang mengatakan jika BPP tidak masuk dalam penilaian, maka harus dirumpunkan dengan dinas lain dalam satu provinsi,” ungkapnya.

PJKSE mencatat, masih banyak BPP Daerah yang bertipe C, sementara RPP OPD tersebut sudah resmi menjadi PP 18 Tahun 2016 yang disahkan per



21 Juni 2016 “Selama ada pasal tersebut, dan belum direvisi, kita masih rawan,” terangnya.

Hal ini tentu ‘merugikan’ BPP Daerah apabila harus dirumpunkan dengan Bappeda, dan tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah badan. Beberapa permasalahan tentu akan muncul, seperti tidak bisanya berkembang BPP di Daerah. “Ada semacam psikologi posisi antara BPP pusat dengan daerah. Jika BPP Daerah dirumpunkan dengan Bappeda, maka akan dipimpin oleh pejabat di bawah eselon II. Akibatnya, ketika BPP Daerah mengadakan program acara yang membutuhkan pimpinan pusat sebagai pembina atau memutuskan kebijakan, maka ada semacam pola *non egaliter* yang membuat pemimpin pusat tidak bisa menghadiri, akibatnya yang datang bukan pemangku kebijakan, hanya perwakilan saja,” jelasnya.

Selain itu, percepatan pengesahan PP tersebut berbanding lurus dengan percepatan kinerja yang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada dinas-dinas yang tertuang dalam RPP OPD tersebut, salah satunya adalah BPP Daerah.

Semua program kerja ditargetkan Juni sudah selesai, terhitung per Agustus sampai Desember semua program telah dibentuk dengan mengikuti sistem lembaga atau dinas yang baru sesuai dengan yang tercantum dalam PP 18 Tahun 2016 tentang OPD. “Tahun 2017 sudah dibuat pola anggaran baru, dengan lembaga yang baru. Itu percepatan yang diinginkan oleh Jokowi. Ini kan mekanisme yang dibangun sendiri. Sambil menunggu hal tersebut, BPP Daerah juga sudah merencanakan Pagu



Kuswanto, Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional BPP Kemendagri ke Ditjen Otda untuk bertemu dengan Rahajeng Purwanti, Direktur Fasilitasi Kelembagaan membicarakan RPP OPD itu.

Menurut Rahajeng, berkas PP OPD saat ini merupakan revisi terakhir per 30 Mei lalu. Selanjutnya, Dirjen Otda langsung m e n g a d a k a n pemetaan ke-34 daerah mulai dari 12 Juni hingga 2 Juli guna

sosialisasi PP No 18 Tahun 2016. "Untuk itu kami akan mengutus orang pusat yang benar-benar paham tentang PP OPD itu. Agenda ini bukan merupakan agenda main-main atau sekedar jalan-jalan, tapi ini kerja sungguhan!" tandas Rahajeng.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga akan mengajak Kementerian dan Lembaga lain yang berkaitan dengan dinas-dinas terkait sesuai yang terangkum dalam PP OPD. Setidaknya setiap daerah yang dikunjungi harus ada Eselon I, Eselon II, dan staf.

Selain paham tentang PP OPD, tim yang turun juga harus paham indikator unsur penunjang dan IT (untuk penilaian secara elektronik). "Sebelum berangkat, pada 6 Juni akan ada *Training of Trainers (ToT)* terlebih dahulu pada tim yang akan diberangkatkan, agar ada keselarasan maksud dan tujuan. Sebab, nanti tim yang ke sana akan disambut oleh Gubernur atau pemerintah daerah setempat. Mereka akan membawakan sambutan dari Pak Menteri, dan SOP. Jadi harus benar-benar orang yang bisa diandalkan," terangnya.

Sementara itu, dari BPP sendiri, disarankan untuk menunjuk minimal 12 orang perwakilannya terkait sosialisasi OPD itu. "Anggaran dibebankan pada komponen masing-masing. Satu provinsi perwakilannya satu orang. Kita utamakan dahulu ke provinsi yang memiliki kabupaten/kota kurang dari 20," tutupnya. (IFR)

Anggaran Desember sampai DIPA," kata Teguh

Tentu menentukan pola anggaran sambil menunggu nasib yang belum jelas ini, membuat banyak pengelola BPP Daerah semakin bingung dalam mengambil langkah dan bertindak. Untuk itu, dalam FKKPD kemarin, BPP Kemendagri juga meluncurkan *simulasi* untuk menentukan kategori BPP di Daerah masing-masing. "Dari hasil itu, kami berencana mengawal BPP yang bertipe A, untuk tetap menjadi tipe A, jangan melenceng dari hasil perhitungan kami. Sementara BPP yang bertipe C, kami akan adakan pelatihan dan pengawalan," terangnya.

Menurut Teguh, BPP Kemendagri juga melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri tentang revisi RPP OPD (sebelum resmi disahkan). Namun Dirjen Otda Kemendagri tidak meresponnya, karena alasan pertimbangan dari MenPAN RB yang sudah tetap. "Itulah, makanya jadi terkesan ada persepsi yang dipaksakan untuk memasukan fungsi penunjang Litbang tentang perencanaan pembangunan," terangnya.

Selain itu, BPP Kemendagri juga sedang berusaha merancang revisi Permendagri No 106 Tahun 2002 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti. "Bagi yang masih bertipe C, kita akan dukung apa saja yang kurang. Semisal masalah keterbatasan SDM atau peneliti, kami juga tengah menggodok revisi permen itu. Nantinya dalam Permen tersebut di tahun pertama dan kedua, BPP Daerah wajib mengajukan dua peneliti dalam setahun," paparnya.

Sosialisasi PP OPD

Lima hari kemudian, tepatnya pada (31/05) tim BPP Kemendagri diajak oleh Yuddy



Dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari Pejabat Kementerian Dalam Negeri, akademisi, pengamat politik, LSM, KPU, dan masyarakat umum bedah buku 'Politik Hukum Pilkada Serentak' karya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapat sambutan meriah dan antusias dari para peserta.

Bedah buku menghadirkan beberapa narasumber ternama seperti, Bima Arya (Walikota Bogor), Budiman Sudjatmiko (Komisi II DPR RI), Phillips J. Vermonte (Direktur CSIS), dan Domoe Abdie (Plt. Kepala BPP Kemendagri). Acara diselenggarakan oleh BPP Kemendagri melalui Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi pada Selasa (3/5), di Aula BPP, Jalan Kramat Raya, Jakarta.

Bedah buku juga dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak yang berlangsung pada 2015 dan dirasa masih banyak kekurangan. Permasalahan tersebut seperti masih banyaknya praktik-praktik kecurangan dan konflik politik. Masih beredarnya praktik politik uang (*money politic*), serta konflik saat penetapan hasil Pilkada yang mencederai cita-cita demokrasi bangsa.

Terbitnya buku karya Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut diapresiasi oleh para narasumber, tidak terkecuali Phillips J. Vermonte. Ia



BPP KEMENDAGRI SELENGGARAKAN BEDAH BUKU

BUKU MENDAGRI TJAHJO KUMOLO DIAPRESIASI

mengaku Tjahjo sudah melihat politik secara makro. Menurutnya Mendagri sudah sangat memahami.

"Politik itu ibarat melihat hutan dengan pohon, namun terkadang orang hanya melihat pohon tanpa melihat hutan," kata Philips.

Sejalan dengan Philips, Bima Arya mengatakan pengaruh kuat Pilkada sangat terasa di kalangan masyarakat. Khususnya masih banyak masyarakat pragmatis dengan politik, dan rentan dengan politik uang. "Yang masih rentan adalah masyarakat pedesaan, mereka masih menyukai sembako,

uang, atau kaos dari setiap pemilihan," ungkap Bima.

Selain itu, Budiman Sudjatmiko, mengatakan, pilkada selalu melahirkan pemimpin idaman masyarakat. Selama ini, masyarakat Indonesia melakukan pemilihan dengan harapan terakhirnya pemimpin yang bisa menjadi wakil aspirasi masyarakat.

"Ada dua jenis pemimpin di Indonesia, yang lahir dari proses Pilkada, yang pertama pemimpin yang dicintai, dan pemimpin yang dibutuhkan," terang Budiman. (MSR/IFR)

JBP TERIMA SERTIFIKAT PERPANJANGAN AKREDITASI

Jurnal Bina Praja (JBP) mendapat SK Kepala LIPI dan Sertifikat Akreditasi di Pusbindiklat Peneliti LIPI, Kompleks Cibinong Science Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/5).

Dalam acara tersebut, LIPI juga memberikan sertifikat kepada 34 jurnal ilmiah dari berbagai kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia serta SK Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti (PKP-PAK-JFP) kepada beberapa kementerian dan lembaga yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, LIPI, BATAN, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

Sebagai pembina jurnal kementerian dan lembaga, LIPI saat ini tengah mendorong publikasi ilmiah terakreditasi untuk menjadi jurnal internasional. Menurut Sekretaris Utama LIPI Siti Nurmalianti Prijono, saat ini terdapat tujuh jurnal internasional bereputasi yang berada di bawah binaan LIPI. Ketujuh jurnal tersebut di antaranya *Mev Journal*, *Marine Research In Indonesia (MRI)*, dan *Indonesian Journal on Geoscience* Kementerian ESDM.

Selain Siti, Ketua Panitia Penilai Majalah Ilmiah LIPI Lukman Hakim mengatakan, budaya publikasi di Indonesia harus ditingkatkan, utamanya dalam hal kualitas penulisan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap para penulis dan peneliti Indonesia yang tidak pernah lepas dari budaya plagiarisme. Selain itu, Lukman juga menyayangkan banyaknya para ilmuwan Indonesia yang memublikasikan artikelnya dalam jurnal internasional palsu.



“Banyak ilmuwan yang terporosok memublikasikan di jurnal internasional abal-abal. Contohnya *Shadow Journal Academic*, Indonesia menempati urutan kedua penulis terbanyak di jurnal tersebut,” kata Lukman.

Menurut Lukman kejadian tersebut tidak terlepas dari peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap dosen untuk menulis di jurnal internasional. Pada masa mendatang Lukman mengharapkan, adanya alokasi anggaran yang besar untuk penelitian, sehingga para ilmuwan Indonesia yang di luar negeri bisa kembali dan memunculkan penelitian-penelitian yang berkualitas.

“50 persen publikasi yang ada di Malaysia dan Singapura itu berasal dari para peneliti Indonesia yang bekerja di sana, Indonesia sumber penelitian, terutama masalah konflik dan bencana, itu tidak pernah habis dan itu menjadi produk publikasi negara lain. Bangsa ini bisa besar dengan ilmu pengetahuan, maka harus ada anggaran yang cukup untuk itu,” ucap Lukman. (MSR)

FGD BAHAS KINERJA BUMD

JAKARTA - Otonomi daerah yang sudah berjalan seperempat abad lebih, belum juga membawa dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Pertumbuhan ekonomi masih jauh dari harapan. Keberadaan BUMD sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam aspek ekonomi juga belum berperan maksimal.

Dalam FGD (*Focus Group Discussion*) yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah 18/3 yang lalu dengan tema 'Memaksimalkan Kinerja BUMD.' Guru Besar IPDN Muchlis Hamdi mengatakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang melekat pada BUMD, salah satunya manajemen pengelolaan yang kurang baik.

“Contoh kecil, misalnya, kepala daerah sering menempatkan pengawas atau komisaris pada BUMD yang tidak memunyai latar

belakang bisnis karena unsur politis. Sehingga para pengawas tidak melaksanakan sesuai tupoksinya.” ujar Muchlis.

Begitu juga dengan M. Ikhsan pakar pemerintahan, ia mengatakan, BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien.

“Contohnya PDAM yang ada di daerah, masih terdapat kebocoran, kadang kala terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. BUMD juga terkesan jalan di tempat,” papar M. Ikhsan.

Berdasarkan data kompilasi statistik perbankan di Indonesia, terdapat 1.007 buah BUMD di Indonesia dengan kontribusi laba senilai 10.372 triliun rupiah, 71 triliun rupiah dihasilkan dari Perbankan Umum yang hanya berjumlah paling minim yaitu 26 Buah. Sementara PDAM

dengan jumlah sebanyak 388 hanya menghasilkan 585, 27 juta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan beberapa masalah pengelolaan BUMD tersebut di antaranya, Pengelolaan BUMD masih belum optimal, baik dari aspek keuangan maupun kinerja, kerja sama pada PDAM belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan PDAM, serta pengembangan PD Pasar belum didukung regulasi dan komitmen yang kuat dari pemda. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja BUMD. (MSR)



PENINGKATAN KUALITAS PENELITI MELALUI WORKSHOP MENULIS OPINI

Hasil-hasil penelitian sangat penting untuk dipublikasikan kepada khalayak luas ketimbang hanya dinikmati segelintir orang dalam sebuah jurnal ilmiah. Melalui workshop teknik menulis opini dan feature ilmiah populer, para peneliti BPP Kemendagri diharapkan dapat menyumbangkan gagasan hasil penelitiannya dalam media massa.

Hasil-hasil penelitian jarang terpublikasi dan terkesan hanya dinikmati oleh segelintir orang, penikmat hasil penelitian pun terbatas pada kalangan tertentu. Jurnal ilmiah sebagai wadah para peneliti untuk menyumbangkan ide dinilai belum mampu menyedot perhatian publik. Selain bahasa yang digunakan tidak menarik untuk dibaca, penyebaran jurnal ilmiah pun dari segi kuantitas dan kalangan penerimanya masih terbatas.

Hal tersebut yang kemudian ditangkap oleh BPP Kemendagri

dalam rangka pengembangan kualitas serta mendorong para peneliti untuk memublikasikan hasil-hasil penelitiannya tidak hanya melalui jurnal ilmiah, tetapi juga media massa.

Workshop yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut mengambil lokasi di Kota Bogor, Jawa Barat 26-28 April 2016. Adapun tema workshop Teknik Menulis Opini dan *Feature* Ilmiah Populer, pelatihan kepenulisan tersebut juga terlaksana atas kerja sama BPP Kemendagri dengan Knowledge Sector Initiative (KSI), Australian Aid, dan Tempo Institute.



Plt. Kepala BPP Kemendagri melalui Kabag Umum BPP Kemendagri Jonggi Tambunan mengatakan, pelatihan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas BPP Kemendagri khususnya peneliti dalam mengomunikasikan hasil riset melalui penulisan populer. Sehingga hasil dan pemikiran peneliti bisa dipublikasikan melalui media massa yang

dikonsumsi oleh khalayak umum.

“Selama ini sudah banyak hasil riset yang tidak terpublikasi, kita juga bertanya-tanya apakah sudah sampai ke masyarakat atau belum, kita bandingkan dengan LIPI, hasil penelitian mereka menonjol karena diekspos melalui media,” ucap Jonggi.

Mardiah Chamim, Direktur eksekutif Tempo Institute juga mengatakan, para peneliti memunyai informasi dan data yang cukup untuk disampaikan kepada masyarakat di tengah informasi yang membanjiri publik selama ini. Data menyebutkan, terdapat 110.000 berita per-hari dari berbagai media elektronik, rata-rata satu berita muncul dalam waktu satu detik. Selain itu tingkat akurasi data dari ribuan informasi tersebut kadang diragukan.

Masalah kepenulisan

Dalam acara terbatas yang diikuti oleh para peneliti tersebut juga membahas masalah-masalah yang sering ditemukan dalam jurnalistik, khususnya penulisan opini dan *feature*. Mardiah menambahkan, salah satu masalah utama kepenulisan adalah keterbatasan penulis mengembangkan ide dan substansi tulisan yang belum spesifik.

“Masalah penulis pemula atau peneliti bukan dari cara mengembangkan ide, tetapi tulisan biasanya lebih luas, dan

angle tulisan juga harus lebih spesifik,” kata Mardiah.

Masalah lainnya adalah kemampuan penulis dalam menyajikan ide dalam bentuk kalimat sederhana. Menurut Mardiah, langkah penting meningkatkan kualitas tulisan adalah dengan memangkas kata-kata yang tidak perlu.

Dalam menulis opini, peneliti juga harus membedakan bahasa penyampaian pada karya tulis ilmiah murni yang ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia resmi. Sementara ilmiah populer atau opini harus ditampilkan dengan bahasa yang lebih *luwes*, serta dapat dipahami masyarakat umum. Selain itu, biasanya membahas permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat.

Acara tersebut tidak hanya berisi penyampaian teori dari para narasumber, tetapi juga diisi dengan praktik menulis opini dari para peserta *workshop*. Di hari ketiga acara ditutup dengan pemberian penghargaan untuk para peserta terbaik. (MSR)



FKPPD 2016 MEMPERKUAT EKSISTENSI BPP DI DAERAH

Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) 2016 yang diselenggarakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada 11 s.d 13 Mei 2016 lalu di antaranya membahas eksistensi kelembangan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Daerah menyongsong penggantian PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut saat ini telah mencapai tahap yang sudah hampir ditetapkan menjadi PP.

RPP tersebut mengatur kelembangan BPP Daerah dan terdapat dalam Pasal 24 Ayat 1 yang menyatakan, badan daerah provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah provinsi yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Draf RPP tersebut kemudian memunculkan beberapa permasalahan dan menjadi pertanyaan beberapa BPP di daerah. Sebagian besar menyarankan perlunya dibuat kesepakatan serta komitmen bersama mengenai aturan-aturan yang tidak mempersulit kelembangan BPP dalam RPP tersebut.

BPP Daerah juga mempertanyakan penilaian dalam faktor teknis yang tidak mencantumkan variabel peneliti, produk kelitbang, dan besaran program kelitbang yang dianggap tidak memperkuat posisi kelitbang di daerah.

Namun di tempat terpisah Heriyandi Roni, peneliti BPP Kemendagri mengatakan, tidak ada masalah terkait RPP OPD yang akan segera disahkan dalam kaitan dengan BPP Daerah, ia optimis akan terbentuknya

BPP di provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya RPP juga cukup akomodatif untuk memosisikan BPP sebagai badan tersendiri pada perangkat daerah sebagaimana tertera dalam UU No 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah.

“Optimisnya karena penilaian dalam faktor umum dan teknis yang dirumuskan dalam PP ini dengan indikator masing-masing faktor, menjadikan peluang berdirinya BPP di daerah,” kata Roni di BPP Kemendagri.

Terkait dengan beberapa indikator faktor penilaian, menurut Roni, beberapa usulan seperti SDM peneliti dan besaran program sudah ditawarkan jauh di awal proses pembentukan PP. Menurutnya, dalam perkembangannya, usulan tersebut dirasa tidak akan mewakili eksistensi BPP secara makro atau keseluruhan.

“Dengan indikator jumlah peneliti dan produk kelitbang, akan menjadi tidak adil dengan BPP Daerah yang belum berkembang atau belum terbentuk.



Namun, justru dengan penilaian yang sudah dirancang, akan berpotensi menjadikan BPP Daerah paling tidak memiliki nilai skor minimal C, artinya sangat memungkinkan tetap berdiri sendiri,” terang Roni.

Dari rancangan penilaian tersebut Roni memperkirakan, akan berdiri BPP Daerah di sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan salah satu kemajuan dan bentuk perhatian BPP Kemendagri, serta terus memantau perkembangan RPP OPD untuk eksistensi BPP di daerah. Mengingat saat ini hanya ada 21 BPP Daerah di tingkat provinsi dari 34 provinsi dan sedikit di kabupaten/kota.

Memperkuat UU

Hadirnya PP OPD tersebut juga bisa dijadikan antisipasi akan keberadaan Perda yang menggugurkan kewajiban pendirian BPP Daerah pada UU No 23 Tahun 2014. PP tentang OPD yang tengah dirancang, dianggap cukup moderat untuk diimplementasikan.

Menurut Roni, perda bisa saja dibuat oleh gubernur, bupati/walikota dan DPRD, pasalnya pembentukan perda juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan, ditambah cara pandang gubernur, bupati/kepala daerah selama ini yang dianggap belum mementingkan keberadaan BPP di daerah.

“RPP OPD ini, sejatinya juga untuk mengawal eksistensi BPP di daerah, meski sudah ada dalam UU terkait pendirian BPP Daerah, dan RPP bisa saja tidak dibuat. Karena daerah belum *litbang minded* atau belum menyusun *policy* daerah berbasis riset, sehingga BPP masih belum dianggap perlu berdiri,” ucapnya

Roni menegaskan, RPP tersebut juga akan mengakomodasi keperluan BPP di daerah seperti fungsional peneliti, struktural, maupun produk kelitbang. Karenanya, RPP tersebut juga mengatur *inpassing* (penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional).

“Misalnya jika berdiri perangkat daerah yang juga ada kelompok jabatan fungsional, maka perlu tenaga fungsional yang menguasai pada bidang tersebut, sama halnya pada bidang-bidang lainnya,” tegas Roni.

Untuk memperkuat pernyataan tersebut, Teguh Narutomo Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sisdur, serta Evaluasi Kinerja ASN BPP Kemendagri mengatakan, RPP tersebut sudah hampir disepakati oleh pemerintah.

Dalam forum yang dihadiri para pengelola BPP daerah tersebut, Teguh menyarankan para pengelola BPP daerah untuk tidak terlalu berharap lebih dan berdiskusi panjang lebar. Menurut Teguh, BPP Kemendagri saat ini tidak tinggal diam, pihaknya tengah berjuang untuk kemajuan BPP di daerah. Salah satunya BPP Kemendagri sudah membuat surat resmi kepada Menteri, terkait kemungkinan penghilangan kriteria yang memberatkan BPP dalam Pasal 27 tentang OPD.

Acara yang dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri tersebut disambut cukup antusias oleh pengelola BPP daerah, salah satunya Herri Yuheri Sekretaris Balitbangnovda Sumsel yang mengapresiasi kegiatan tersebut, ia mengharapkan BPP Kemendagri secara rutin mengadakan forum diskusi sebagai wadah komunikasi antara BPP Kemendagri bersama BPP Daerah.

“Cukup bagus, acara-acara seperti ini sebaiknya rutin dilakukan, tidak hanya Rakornas yang cakupannya luas. Forum diskusi tersebut diharapkan bisa menemukan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang selama ini kerap menghantui BPP khususnya di daerah,” ungkap Herri.

Simulasi penilaian

FKPPD 2016 juga me-launching simulasi penilaian eksistensi dan penilaian BPP terkait Organisasi Perangkat Daerah secara *online*. Dalam simulasi tersebut setiap pengelola BPP daerah bisa mengetahui berada pada tipe manakah BPP Daerah tersebut.

Terdapat dua perangkat penilaian yaitu faktor umum dan faktor teknis. Faktor umum menunjukkan beberapa variabel yang terdiri dari jumlah penduduk suatu daerah di mana BPP tersebut berdiri, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sementara, faktor teknis terdiri dari beberapa variabel yang terdiri dari jumlah perangkat daerah yang ada di provinsi, kabupaten/kota, termasuk kecamatan, luas wilayah, dan jumlah kebijakan daerah atau jumlah peraturan bupati/walikota.

Penilaian tersebut juga secara otomatis akan menampilkan nilai yang sudah diatur sesuai dengan besaran jumlah yang terdapat dalam faktor umum dan faktor teknis.

BPP Sumatera Utara, misalnya, dengan jumlah penduduk 13.766.851 jiwa memiliki nilai 100. Dengan luas wilayah sekira 72.981 kilometer persegi, BPP Sumut otomatis memiliki nilai 50. Sementara, dengan besar APBD senilai 9.004.403.490.630 rupiah memiliki Nilai 50, kemudian 52 perangkat daerah menghasilkan nilai 250, dan sebanyak 707 buah jumlah kebijakan yang dihasilkan mendapatkan nilai 180. Maka, total nilai yang didapat oleh BPP Sumut adalah 730. Sehingga kesimpulan, BPP Sumut mendapat nilai A.

Simulasi penilaian secara *online* merupakan langkah bagi kemajuan BPP selama ini. Di tengah banyaknya BPP Daerah yang mempertanyakan posisi mereka berdasarkan penilaian tersebut, meski banyak juga yang tidak menggubris peraturan serta memperlakukan substansi pengklasifikasian BPP tersebut.

Adanya langkah maju tersebut diharapkan, agar BPP Daerah bisa menyesuaikan sendiri besaran perangkat yang harus dimiliki dalam suatu badan yang dipimpinya. Simulasi penilaian tersebut juga diharapkan bisa dicontoh oleh beberapa lembaga BPP pada kementerian lain. (MSR)





LAUTAN MANUSIA:

Pusat perbelanjaan Tanah Abang yang merupakan pusat grosir pakaian terbesar se-Asia Tenggara dipadati pengunjung di akhir pekan, menjelang hari raya Idul Fitri

Perpustakaan Soeman HS

ARSITEKTUR TERBAIK SE-ASEAN

Bangunan melayu megah nan indah berdiri kokoh di tengah Kota Pekanbaru, Riau. Penduduk sekitar biasa menyebutnya Perpustakaan Soeman HS. Salah satu kebanggaan penduduk Riau yang menjadi objek wisata yang unik dan menawan di sana.

Bertembokkan cat jingga dengan struktur arsitek yang tidak biasa, puluhan tiang menyangga penutup kepala gedung yang mirip seperti rehal atau alas membaca Al-Qur'an yang menjadikan bangunan sejak diresmikan 2008 itu menjadi model bangunan arsitektur terbaik se-ASEAN. Mengalahkan bangunan lainnya dari 19 negara yang ikut serta dalam seleksi desain arsitektur yang mencerminkan identitas ASEAN.

Desain gedung Perpustakaan Soeman HS dinilai berhasil menonjolkan karakteristik budaya lokal, tanpa meninggalkan unsur modernitas dan kualitas pertukangan. Persis ketika mata memandang bangunan yang menjulang dengan enam lantai itu. Dinding-dinding perpustakaan terukir ornamen unik dan sejarah peradaban manusia dengan ukiran bercat putih seperti nuansa di negara-negara Eropa. Namun tetap memadukan budaya Indonesia dan Melayu.

Kota Pekanbaru, yang terkenal dengan Kota Madani memang sebagian besar penduduknya adalah orang Melayu dan Minang, yang begitu kuat dengan kekentalan Islami-nya sehingga hampir setiap ruangan di perpustakaan ini dituliskan dengan bahasa Indonesia yang di bawahnya juga disertai dengan huruf Arab gundul.

Selain itu, nama Soeman HS sendiri diambil dari penyair Melayu terkenal asal Riau yang banyak menghasilkan karya luar biasa yang mengharumkan nama Riau. Menurut Panogoan Sihombing, Pustakawan Soeman HS, nama Soeman HS sengaja dipilih untuk mengenang karya-karya luar biasanya yang tidak pernah surut.

Perpustakaan yang dibangun di atas lahan 4 hektar tersebut pertama kali memang diprakarsai Gubernur Riau kala itu, Muhammad Rusli Zainal. Menurut Panogoan, peran Rusli saat itu memang sangat besar dalam pendirian perpustakaan. "Ide dan konsep bangunan perpustakaan ini merupakan idenya. Dia cari sendiri bagaimana idenya, ornamennya

dipadukan budaya Melayu dan Indonesia. Makanya kita mengusahakan dia sebagai Bapak Perpustakaan Riau selama tiga tahun," kata Panogan.

Pemerintah Propinsi Riau memang tidak main-main untuk membangun Perpustakaan Soeman HS ini, bangunan tersebut menghabiskan biaya 150 miliar rupiah selama dua tahun pembangunan sejak 2006. Terasa betul bagaimana ruangan bacanya sangat nyaman dilengkapi dengan AC dan berbagai fasilitas. Banyak pengunjung yang betah berlama-lama di sana. Hampir sebagian besar pengunjungnya adalah mahasiswa yang sedang mencari referensi untuk tugas kuliah atau tugas akhirnya. Terlebih dilengkapi dengan *hotspot Wi-Fi* yang dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung secara gratis.

Koleksi buku di sini juga luar biasa jumlahnya, menurut Panogan, total buku di Perpustakaan Soeman HS mencapai 385 ribu eksemplar, dan terus bertambah setiap tahunnya.

Saat memasukinya, di lantai dasar kami disambut dengan ruangan membaca anak-anak. Bertuliskan *Children Library*, di sini anak-anak bisa membaca buku dan bermain secara menyenangkan, karena pada bilik ini anak-anak akan dimanjakan dengan fasilitas komputer IBM yang berisikan permainan edukasi anak-anak. Tidak jauh dari *Children Library*, ada loker dan tempat penitipan tas.

Untuk bisa menggunakan loker, pengunjung harus meninggalkan kartu tanda pengenal seperti KTP atau KTM

(untuk mahasiswa). Lalu petugas akan memberikan kunci loker untuk menyimpan barang bawaan sebelum naik ke lantai satu. Pada lantai ini juga pengunjung baru bisa membuat kartu perpustakaan yang dibuatkan secara langsung, mudah, dan praktis yang berlaku selama lima tahun untuk umum, dan empat tahun untuk mahasiswa.

Masih di lantai yang sama, belasan komputer melingkar dalam suatu ruangan khusus. Beberapa pengunjung terlihat asyik memainkan komputer dan internet, ada yang sedang mencari referensi di *google*, membuka *youtube*, atau sekadar bermain *solitaire*. Di lantai itu juga terdapat tempat sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, dan rak-rak yang berisikan berbagai jenis koleksi buku agama, IT, sains, motivasi, bahasa asing, atau buku-buku pelajaran. Di tempat ini banyak siswa dan mahasiswa duduk untuk belajar, mengerjakan tugas atau sekadar berdiskusi. Catatan pengelola di sini, setiap hari setidaknya ada 800 pengunjung di perpustakaan yang dapat menampung hingga seribu pengunjung itu. "Minat bacanya cukup bagus," kata Dia.

Untuk peminjaman buku, sayangnya maksimal buku yang boleh dipinjam hanya 2 buku dengan waktu peminjaman satu minggu. Menurut Panogoan, tidak ada sistem denda di sini jika terlambat mengembalikan buku. Hanya saja berlaku peraturan bahwa tidak boleh meminjam buku selama jumlah hari keterlambatan pengembalian. "Misal, terlambat 7 hari, maka orang itu tidak boleh meminjam selama 7 hari," terangnya.

Sayangnya, peminjaman buku masih dilayani secara manual dan belum menggunakan teknologi terkini dengan *barcode*.

Memasuki lantai 2, kami disugahi rak-rak yang dipenuhi berbagai jenis koleksi buku. Koleksi buku ini lebih diperuntukkan bagi mahasiswa karena terdapat buku-buku referensi kuliah bertema kedokteran, kebidanan, manajemen, teknik, pertanian, dan ilmu sosial. Panogan yang berperawakan gendut sambil *ngos-ngosan* berkeliling satu per satu menyebutkan berbagai koleksi secara runut, seolah sudah hafal di luar kepala. "Dari kelompok 000 Filsafat, 100 ilmu murni, 200 agama, 300 sosial, 400 hukum, 500 manajemen, 600 terapan, 700 kesenian, 800 bahasa, dan 900 sejarah," terangnya.

Setiap lantainya berisikan satu komputer agar memudahkan pencarian. Namun hanya tersedia satu komputer, sehingga pengunjung yang membludak harus antre dan sabar menunggu giliran. "Ya, sayangnya hanya satu. Tapi kalau sudah yang sering ke sini mereka langsung saja ke rak yang sudah mereka hafal," terangnya.

Sayang sekali kami tidak diizinkan untuk menengok bagaimana kondisi di Lt.3,

karena sedang dipakai instansi tertentu untuk belajar. Panogoan hanya menjelaskan apa saja koleksi yang berada di Lt.3 "Di atas khusus koleksi buku yang tidak boleh dipinjam, seperti ensiklopedia, kamus, atlas dunia, komik dan jurnal penelitian serta berbagai jenis majalah seperti Gatra dan Tempo. Di lantai ini juga terdapat sebuah tempat khusus bernama Bilik Melayu," terangnya.

Bilik Melayu memang khusus berisikan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Riau, pengarang dan sastrawan Riau, sekaligus ratusan koleksi buku-buku Melayu yang juga terdapat di lantai dasar. Karena kelengkapan koleksi di bilik ini menjadikan Perpustakaan Soeman HS ditetapkan sebagai pusat buku-buku sejarah kebudayaan Melayu di Sumatera oleh Badan Perpustakaan Nasional.

"Di samping ruangan Bilik Melayu, terdapat ruangan khusus berisi kumpulan skripsi dan tesis. Selain itu, terdapat ruangan diskusi kedap suara yang bisa digunakan untuk berdiskusi. Jadi tidak akan mengganggu para pengunjung yang sedang membaca," kata dia

Lalu dia bercerita, di lantai 4 terdapat *Chevron Energy Corner* berisikan tentang informasi berkaitan dengan perusahaan Chevron. Ini merupakan sumbangan dari Chevron sendiri. Sedangkan di lantai 5 dan lantai 6 khusus untuk ruang kantor dan kepegawaian.

Para petugas perpustakaan sangat ramah dalam melayani para pengunjung dan anggota pustakanya. Tidak heran Perpustakaan Soeman HS tidak pernah sepi dari pengunjung. Perpustakaan bisa dibalang contoh citra perpustakaan daerah yang jauh dari identik gedung kuno dan buku-buku lama yang semakin membuat masyarakat malas berkunjung ke perpustakaan.

Layanan di Soeman HS beroperasi setiap hari, dan hanya tutup saat libur nasional. Jam operasional mereka buka dari Senin s.d Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Khusus Sabtu & Minggu mereka hanya buka dari pukul 09.00 sampai 14.00 WIB. (IFR)



Meski pemberitaan mengenai kesiapan Palembang sebagai tuan rumah *Asian Games 2018* begitu ramai, tetapi belum terasa di kawasan olahraga seluas 352 hektar tersebut. Umbul-umbul atau papan reklame belum begitu tampak menghiasi penyambutan event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Tetapi, hasrat untuk melihat kemegahan kawasan olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu pun tetap membunchah, ditambah lagi udara saat itu cukup cerah dan terik matahari cukup membantu menghangatkan tubuh dari embusan udara sejuk di kawasan JSC (*Jakabaring Sport City*).

Setelah bertemu Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis JSC kami diajak mengitari kawasan yang berada di Jalan Gubernur H. A Bastari. Dua buah sepeda motor cukup mengantarkan kami untuk mengililingi JSC. kawasan JSC didesain sangat ramah lingkungan, jalanan menuju setiap arena dibuat sangat mengasyikan. Sisi jalan yang dipenuhi rindangnya pepohonan, hingga pemandangan arena olahraga yang menakjubkan.

Salah seorang staf pengelola JSC Romayanto, sangat bersemangat mengantar kami mengelilingi kawasan JSC. ia sekaligus menjadi pemandu kunjungan kami. Kedua lengannya berselonjor ke depan mengemudikan sepeda motor pabrikan Honda keluaran beberapa tahun silam, sesekali ia mengangkat tangan dan menunjukkan telunjuknya ke arah beberapa *venue* yang menjadi arena pertandingan dalam setiap event yang diselenggarakan.

Melewati jalanan di dalam kompleks JSC seakan enggan mengedipkan mata. Pohon Trembesi dan pohon Tanjung berjejer rapi menemani kami sepanjang jalan. Membuntuti seakan menyapa kami yang sedang melaju motor. Kicau burung menyapa hangat tanpa ternodai suara bising kendaraan sedikit pun.

Roma menghentikan motor di lahan parkir bersebelahan

dengan gedung pengelola di bawah rindangnya rimbun daun Sengon, menyebarkan aroma khas pegunungan. Memberi perasaan sendu seketika. Sambil menunjuk ke ujung danau yang luas, Roma menegaskan, tempat tersebut merupakan arena ski air yang dimiliki JSC, dan satu-satunya arena ski air yang paling bagus di Indonesia.

“Ini adalah arena ski air, terbesar se-Asia, saat ini juga telah dilakukan pengembangan dalam rangka persiapan *Asian Games 2018*,” kata Roma.

Arena ski air yang berada di kawasan JSC tidak diragukan lagi. Arena seluas 40 hektar tersebut merupakan arena ski air terbesar se-Asia yang digunakan sebagai tempat para atlet dunia berlatih dan berlaga. Ketertarikan para atlet dunia itu dikarenakan fasilitas arena yang sangat memadai yakni terdiri atas dermaga, kapal cepat berteknologi tinggi, hingga tersedianya sebuah penginapan yakni Wisma Atlet Jakabaring. Selain itu, kondisi danau yang masih alami juga ditengarai menjadi daya tarik utama. Ketertarikan lainnya adalah biaya latihan dan akomodasi yang terbilang murah jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain di dunia.

“Selain *Sea Games 2011* arena ski air ini juga pernah digunakan dalam Kejuaraan Asia Junior, September 2013 oleh International Water Ski and Wakeboard Federation,” tegas Roma

Ketertarikan itu juga dilatari biaya latihan dan akomodasi yang terbilang murah jika dibandingkan berlatih di beberapa tempat di negara lain.

Tujuan Wisata Olahraga

Berdiri di atas kawasan seluas 352 hektar, *Jakabaring Sport City (JSC)* memiliki 18 *venue* berstandar internasional, beberapa *venue* tersebut di antaranya Stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Lapangan Tenis Bukit Asam, Stadion Atletik, Stadion Akuatik, GOR Badminton, GOR Dempo Senam, Arena Baseball dan



untuk memantau kesiapan menghadapi *Asian Games*, seperti Saudi Arabia, Qatar, dan UEA.” kata Rizal.

Wacana Pindah Kelola

Meningkatnya popularitas *Jakabaring* sebagai kawasan olahraga terbesar, mendatangkan wacana bagi pemerintah setempat untuk mendirikan sekolah pariwisata dan universitas olahraga kualitas dunia. JSC juga terus ditunjuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan beberapa pertandingan kelas internasional. Kepercayaan tersebut tidak disiasikan, pemerintah terus meningkatkan pelayanan serta mempertahankan kualitas dan popularitas JSC di mata dunia.

Melesatnya popularitas JSC ternyata tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga mendatangkan dampak negatif bagi perkembangan kawasan olahraga kebanggaan warga Palembang tersebut. Pelayanan maksimal yang saat ini dikelola oleh suku dinas terkait ternyata belum membuat puas Pemerintah Sumatera Selatan. Menurut Rizal, saat ini Pemerintah Sumsel tengah membahas Peraturan Daerah mengenai pemindahan status pengelolaan JSC oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Peraturan tersebut tengah dibahas dan bahkan mungkin sebentar lagi menjadi resmi,” kata Rizal.

Kekhawatiran Rizal tidak berlebihan jika pada akhirnya pengelolaan diserahkan begitu saja kepada BUMD, tetapi masalahnya apakah pengelolaan yang dilakukan BUMD akan sama dengan manajemen pengelolaan yang telah dibuat selama ini. Sehingga dimungkinkan akan mengubah kembali manajemen pengelolaan yang sudah lama dibentuk. Ia juga mengkhawatirkan nasib 400 TLH yang sudah lama bergabung dan ikut merawat JSC.

Pemerintah Sumsel sepatutnya memberikan penjelasan lengkap kepada publik, jika wacana tersebut memang benar adanya. Pemindahan status pengelolaan juga tidak negatif jika alasan tersebut masuk akal dan bisa diterima oleh publik, terlebih untuk idealisasi pengembangan kawasan olahraga terbesar se-Asia, bahkan bisa mengangkat kualitas di mata dunia. (MSR)

“JSC juga menjadi



Gelora Sriwijaya

Mengunjungi *Jakabaring Sport City (JSC)*

Keelokan Gelanggang di Ujung Palembang

Kemegahan Stadion Gelora Sriwijaya tampak dari pintu utama *Jakabaring Sport City (JSC)*, Palembang, sekira seratus meter dari pintu utama, gapura bertuliskan *Gelora Sriwijaya The Stadium* berdiri berwarna kemerahan. Gapura yang melambangkan kebesaran klub sepakbola *Sriwijaya FC* tersebut berdiri kokoh sebagai ikon kota Palembang.



Beginilah jika e-KTP diberlakukan seluruh negeri dan terintegrasi dengan semua pusat data. Memang gampang hidup modern!

1

Terima kasih telah menghubungi Pizza Hut. Ada yang bisa saya bantu?

Boleh minta Nomor KTP anda?

Apa saya bisa pesan Seafood Pizza?

6102049998-45-54610

Oke Bang Pepe, dari database kami, Bapak tinggal di Jl. Merpati No 6, Tlp Rumah 021829256378, Tlp Kantor 021666535872673, dan nomor HP 0818763784022

Menurut kami, itu bukan ide bagus Pak. Dari medical record Bapak, Bapak punya tekanan darah tinggi dan kolesterol yang berlebihan. Mungkin saat ini Bapak bisa memesan Low Fat Hokkien Mee Pizza.

2

Dari mana Anda tahu kalo saya bakal suka itu?"

Oke terserah... sekalian saya pesan paket keluarga, jadi berapa semuanya?

Hm...minggu lalu Bapak baru pinjam buku dengan judul "Popular Hokkien Dishes" di Perpustakaan Nasional.

Total semua Rp 290 ribu

Boleh saya bayar dengan Credit Card?

Bapak harus bayar cash, kartu kredit Bapak tampaknya sudah over limit dan Bapak masih punya utang di bank sebesar Rp 5.350.000, sejak bulan Juni tahun lalu, itu belum termasuk denda tunggakan kredit mobil Bapak."

3

Ya sudah kalo begitu, saya ke ATM dulu ambil uang sebelum tukang antar pizza datang.

Dari data Bapak, sepertinya itu juga nggak bisa Pak. Record menunjukkan batas penarikan uang di ATM sudah habis untuk hari ini.

Busyet...! Sudahlah anterin aja pizzanya ke sini, saya akan bayar cash di sini, dan berapa lama pizza diantar sampai ke rumah?

Waduuuuuh kurang ajar si Mbak menghina!

Sekitar 45 menit Pak karena jalanan tampaknya sedang padat. Tapi kalo Bapak tidak mau menunggu, Bapak bisa mengambilnya sendiri dengan motor bebek butut Bapak.

Data menunjukkan Bapak memiliki motor bebek tahun 1995 dengan Nomor Polisi B-217-AN. Betul kan, Pak?

5

Sialan...nggak sopan loe buka-buka record gua, kamu belum pernah ngerasain ditonjok ya?

Oh hati-hati dan jaga ucapan Bapak. Apa Bapak lupa pada 15 Mei 2010 Bapak pernah dibui 3 bulan karena mengucapkan kata-kata kotor kepada Polisi?

Ada yang lain Pak?, oh ya pak.... Bapak kemaren di luar kota ada urusan dgn KUA ya, karena dari data, Bapak sudah tercatat di 3 KUA, apakah ibu di rumah sudah tahu?

6

Kaga ada. Batalin aja pesanan gue...!!! Dan awassss jangan bilang istri gua yg terakhir ya....

FANNY FABRIANA MUDIK MENYENANGKAN BERSAMA KELUARGA

Lebaran sebentar lagi.. Berbagai keceriaan mulai menyambut seluruh keluarga muslim di Indonesia. Mulai dari mempersiapkan ketupat, opor ayam, baju baru, hingga tradisi mudik ke kampung halaman. Euforia lebaran pun semakin terasa dengan hilir mudik kendaraan ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga besar sambil saling memaafkan

Yups, itulah yang menjadi tradisi bagi artis cantik Fanny Fabriana. Setiap kali *moment* lebaran, Fanny dan suaminya Zacky Badruddin selalu mudik ke Tasikmalaya, Jawa Barat, tempat keluarga besar sang suami. Lantas seperti apa keseruan mudik Fanny sekeluarga? Yuk kita dengar ceritanya.

Bergantian kunjungi rumah eyang

Memiliki latar belakang daerah yang sama dengan sang suami, yakni Jawa Barat. Membuat Fanny harus bergiliran mengajak serta kedua putrinya, Kimora Balqis Baddrudin (4) dan Kaiza Aqeelah Badruddin (9 bulan) ke tempat eyang dan keluarga besar masing-masing. "Aku selalu punya tradisi lebaran hari pertama, aku ke Bandung ke rumah keluarga besar ku, lebaran kedua ke Tasik ke tempat suami aku, baru hari ketiga kita pulang ke Jakarta," ungkap perempuan berpostur 176 cm itu.

Bagi Fanny, *moment* lebaran adalah hal yang sangat pas untuk berkumpul bersama keluarga besar, terlebih dengan hadirnya Kaiza putri kedua Fanny. "Tahun lalu aku memang dapat toleransi untuk tidak mudik karena lagi hamil besar. Nah, tahun ini pasti sudah ditunggu-tunggu sama eyangnya nih, karena ini mudik pertamanya Keiza," ceritanya.

Kebersamaan itu begitu terasa hangat dan lebih mudah bagi Fanny sekeluarga. Mengingat mama Fanny dan mama mertuanya ternyata adalah teman sewaktu SMP. Jadi terasa seperti reuni keluarga dan reuni sekolah. "Aku kalau mudik itu, selalu bawa mobil dua, karena keluarga ku juga ikut ke Tasik (rumah suami-red). Mamaku sama mama mertuaku itu teman SMP. Waktu kita pacaran, kita nggak pernah tahu kalau mereka itu temenan, tahunya waktu lamaran. Eh, sekarang kalau lebaran berasa sekali kebersamaannya, karena sekalian reunion deh, heheh," celotehnya.

Saat disinggung soal kondisi fisik dengan jadwal yang terlalu padat mengunjungi rumah eyang

secara bergantian. Diakui Fanny memang terasa begitu lelah dan kewalahan. "Pastinya lelah sekali, tapi mau bagaimana lagi. Aku memang harus mudik, karena pasti keluarga besar pasti sudah rindu sekali. Apalagi *moment* ini juga setahun sekali," selorohnya

Hadapi kemacetan 8 jam

Mudik lebaran menjadi budaya yang tidak bisa lepas dari budaya Indonesia. Kemacetan panjang sudah pasti bakal terjadi, sama seperti yang dirasakan Fanny sekeluarga saat mudik lebaran. "Sebenarnya durasi waktunya dari Bandung ke Tasik itu 1,5 jam. Tapi karena lebaran, aku dan keluarga bisa menghadapi kemacetan sampai delapan jam," kata artis kelahiran Bandung 29 Januari 1985 itu.

Meski harus berpacu pada kemacetan panjang, namun Fanny memunyai siasat untuk menghilangkan kejenuhan perjalanannya. Salah satunya adalah menyediakan banyak makanan dan cemilan. "Aku selalu sediakan makanan dan cemilan. Jangan hanya untuk anaknya, tapi juga ibunya, karena kalau ibunya senang, anaknya juga senang," ungkapnya.

Selain makanan, Fanny mengaku harus pandai membuat suasana nyaman untuk dua buah hatinya



tersebut. Seperti bernyanyi bersama, menonton DVD di dalam mobil, atau apa pun untuk menghilangkan kejenuhan selama kemacetan menghantui perjalanan. "Biasa kami nyanyi bersama sama anak dan suamiku yang lagi mengendarai kendaraan. Suami juga harus tetap 'on' biar tidak mengantuk selama menyupir," ceritanya.

Meski begitu, Fanny merasa beruntung dengan kemacetan. Sebab, perjalanan macet justru tidak akan membuat dia dan keluarganya mabuk perjalanan. "Kalau perjalanan macet justru nggak mabuk, kalau jalanan berkelok baru mabuk," terangnya.

Suka dandani si kecil di momen lebaran

Selain mudik lebaran, Fanny juga punya kebiasaan mendandani kedua putrinya yang cantik dan menggemaskan. Fanny memang selalu 'gatal' ingin mendandani putri-putrinya itu, apalagi di *moment*

lebaran ini. "Aku memang suka sekali dandani anak-anak ku. Apalagi nanti di *moment* lebaran. Aku sudah menabung untuk beli-beli baju buat Keiza. Apalagi kalau nanti Keiza udah bisa jalan, semakin lucu dan menggemaskan kalau dipakaikan baju," katanya.

Sejak mempunyai anak, instagram Fanny juga penuh dengan gaya Kimora yang lucu dan menggemaskan, hal itulah yang ingin dia tularkan juga pada adiknya nanti. Namun sayang, semakin usianya bertambah, Kimora sudah mempunyai 'taste' dan gayanya sendiri. "Nanti kalau lebaran, semua baju yang aku beli harus ada persetujuan dari Kimora. Karena sekarang dia sudah mulai besar, dan udah punya *good taste*-nya sendiri. Dia udah tahu mana yang lucu. *Yah*, walau pun masih suka nabrak alias nggak *match*. Tapi aku apresiasi gaya dan selera," selorohnya. (IFR)

Usia yang Pantas Berpuasa

Biasanya, para orangtua akan bertanya-tanya 'Di usia berapa saya harus mengenalkan anak berpuasa', 'Kira-kira kuat tidak *yah*, si kecil menahan lapar'. Tidak perlu khawatir dan risau, karena perkembangan setiap anak berbeda-beda dan unik. Jadi tidak ada standar usia tepat kapan memulai mengajarkan si kecil berpuasa. Menurut Psikolog Anak, Ayu Sulistia, S.Psi, yang juga berfokus pada masalah psikologi agama, yang harus dilakukan para orangtua adalah mengenalkan sedini mungkin ritual dan ibadah puasa.

Namun, saat mengenalkan apa itu puasa dan sebagainya, sebaiknya terangkan berdasarkan usianya. "Anak umur 1-3 berada di fase konkret-operasional, baru dapat memahami segala yang berwujud, kongkret, dapat dilihat, dipegang dan dirasakan. Sehingga, mereka belum paham arti puasa, tujuan dari puasa, dan konsekuensi dari berpuasa. Sedangkan anak usia 3-5 tahun, balita mulai memahami puasa artinya tidak makan dan tidak minum. Demikian pula, di bulan puasa, ada beberapa ritual ibadah yang dilakukan bersama-sama, seperti shalat Tarawih berjamaah di masjid, mengikuti ceramah menjelang buka puasa, buka puasa bersama, sahur dan lain-lain," terangnya.

Untuk itu, saat anak usia 1-3 tahun bertanya apa itu puasa, orangtua tidak bisa menjelaskan apa itu pahala, dosa, neraka dan surga. Cukup jelaskan puasa adalah perintah Allah untuk menahan lapar dan haus. "Tidak perlu khawatir, jika si kecil terus-menerus bertanya, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali, karena memang itulah tahapan perkembangan kognitifnya," kata Ayu.

Selain itu, Anda tidak perlu memaksakan balita paham bahwa sahur hanya dilakukan pada dini hari dan bukan siang hari sesukanya. Biasanya, di usia prasekolah, balita mulai lebih memahami puasa dan mulai dapat dibiasakan berpuasa. Tentu sesuai kemampuan anak.

Yang Harus Orangtua Lakukan

Penting untuk diingat, orangtua harus ciptakan suasana menyenangkan saat anak baru pertama kali belajar berpuasa. Agar anak merekam pengalaman positif ibadah puasa. Sehingga akan lebih mudah memotivasinya berpuasa di tahun berikutnya, termasuk juga melakukan ibadah-ibadah lainnya. Berikut ini tip dan saran yang bisa dilakukan orangtua di rumah menurut Ayu:

Pertama, mengenalkan dan mengajarkan anak puasa, harus dimulai dari lingkungan terdekat seperti orangtua. Bagaimana anak mau belajar puasa, jika orangtua sebagai tauladannya tidak puasa. Orangtua, terutama ibu harus bisa memberi contoh dan memantau si kecil dalam

berpuasa. Apalagi ibu mempunyai bonus untuk tidak puasa sekali dalam sebulan. Sebaiknya saat itu terjadi, ibu harus menjaga agar tetap 'terlihat' puasa di depan si kecil, makan sembunyi-sembunyi di kala sedang datang bulan.

Kedua, Lakukan bertahap. Orangtua dapat mengajarkan si kecil berpuasa 3 - 4 jam sekali. Lalu ketika Anda merasa si kecil cukup kuat berpuasa hingga pukul 10.00, perpanjang puasanya secara bertahap hingga pukul 12.00. Lakukan ini di tahun pertama puasanya.

Ketiga, di tahun kedua, Anda bisa mencoba mengajarkan anak Anda berpuasa sehari penuh. Ini pun harus dilakukan perlahan. Jika di tengah hari, ia tampak rewel dan tidak kuat, Anda bisa memberikannya makanan kecil, kemudian puasa bisa dilanjutkan kembali sampai sore. Lama-kelamaan si kecil akan lebih kuat dan akhirnya bisa berpuasa sehari penuh. Atau, saat dia rewel, alihkan rasa laparnya dengan aktivitas ringan seperti mewarnai, menggambar, atau menyusun *puzzle* di rumah.

Keempat, hargai usahanya. Seringkali si kecil mengatakan ia ingin berpuasa sehari penuh, tapi ternyata ia makan di siang hari. Jangan patahkan semangatnya dan mengejek 'kekalannya'. Tetap hargai usahanya untuk berpuasa, sambil terus dibimbing untuk melakukan puasa yang benar.

Kelima, berikan *reward* jika perlu, Anda bisa memberikannya 'hadiah' menu buka puasa favoritnya jika ia mampu berpuasa sesuai target, atau memberinya pujian dan semangat terus menerus dengan ucapan manis. Hal ini bisa memacu semangatnya untuk berpuasa. Seiring berjalannya usia, Anda bisa menanamkan makna dan tujuan puasa yang sesungguhnya pada si kecil.

Keenam, pantau kesehatannya. Terutama jika ini adalah tahun pertama atau tahun keduanya berpuasa, pantau terus kesehatannya. Kondisi fisik tiap anak berbeda-beda. Walaupun mungkin anak-anak lain seusianya sudah kuat berpuasa sehari penuh, belum tentu itu berlaku pada anak lainnya. Jika anak tampak sakit atau tidak kuat, jangan paksakan. Biarkan ia makan cukup, dan apabila ia kuat untuk melanjutkan puasa, perbolehkan ia puasa, jika tidak, tak perlu paksakan.

Terakhir, Salah satu kesenangan anak ketika berpuasa adalah saat-saat berbuka bersama keluarganya. Di saat-saat seperti ini, Anda bisa mengajarkan anak sedikit demi sedikit tentang makna puasa, dan indahnya kebersamaan setelah berpuasa sehari penuh. Tentu rekaman baik terhadap suasana bulan Puasa di rumah akan mendorongnya berpuasa dengan lebih baik di tahun depan. (IFR)

Puasa Yuk Nak!

Bulan Ramadhan sudah tiba, seluruh umat muslim menyambut dengan semangat bulan penuh barokah ini. Tidak terkecuali si kecil yang baru mengenal apa itu puasa dan mengapa umat muslim harus puasa. Nah, untuk memberikan pengertian dan membiasakan si kecil berpuasa, berikut ini ada beberapa tip yang bisa Anda terapkan sebagai orangtua untuk memberikan pemahaman kepada si kecil tentang puasa.



BALIBANGNOVDA SUMATERA SELATAN

Menciptakan Peluang di Tengah Kelesuan

Perhatian dan pembinaan BPP Kemendagri terhadap BPP di daerah selama ini boleh saja minim apabila dibandingkan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti, tetapi itu tidak membuat Balitbangnovda Sumsel kehilangan semangat.

Balitbangnovda Sumsel mencatat, pembinaan terhadap BPP daerah melalui beberapa program kegiatan yang dilakukan BPP Kemendagri beberapa tahun terakhir belum membawa dampak positif. Di sisi lain, BPP dituntut menjadi pengawal inovasi di daerah melalui aturan-aturan yang dirasa mempersulit perkembangan BPP, peraturan tersebut membawa angin badai bagi keberlangsungan eksistensi BPP di daerah.

Namun, seperti kata orang bijak, kelemahan membawa peluang, persoalannya kemudian bagaimana menemukan peluang itu. Salah satu cara yang dilakukan Balitbangnovda Sumsel adalah dengan menggaet kementerian dan lembaga yang bisa memberikan *supporting* dana untuk merealisasikan setiap ide inovasi yang dimiliki. Salah satu kementerian yang bersedia membina sekaligus mendanai program inovasi tersebut adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Itu sebabnya, ada 15 kabupaten/kota di Sumsel yang saat ini dikembangkan menjadi tema strategis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) oleh Balitbangnovda Sumsel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-15 kabupaten/kota tersebut adalah Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Palembang, Muara Enim, Prabumulih, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, dan Lubuk Linggau.

Tidak hanya itu, Balitbangnovda Sumsel juga terus memperkuat jaringan SIDa dengan menjadi penghubung bagi para pelaku inovasi, agar sebuah produk inovasi bisa dikembangkan dan bermanfaat secara luas. Yaitu dengan mempertemukan antara akademisi peneliti dengan masyarakat konsumen, pemerintah, serta dunia usaha.

Hadirnya SIDa juga semakin diperkuat dengan beberapa regulasi yang telah dihasilkan. Regulasi tersebut berupa Surat Keputusan Gubernur mengenai Penguatan Inovasi Daerah. Selain itu, Balitbangnovda Sumsel juga terus membangun MoU dan kemitraan dengan beberapa lembaga swasta dan nasional. Tidak sia-sia, dari beberapa upaya yang telah dilakukan berhasil menjadikan Balitbangnovda menjadi pusat inovasi Sumsel yang difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan Inovasi, seperti *Techno Park*, Graha Teknologi, Ruang Publik, Serambi Difusi Iptek dan Inkubator Teknologi dan Bisnis. Balitbangnovda Sumsel juga terus berupaya dan membantu daerah membentuk pusat inovasi.

Science Techno Park dan pusat inovasi

Menurut Plt. Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan Alamsyah, pengembangan *Science Techno Park* (STP) dan pembentukan Pusat Inovasi (PI) salah satu yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Balitbangnovda Provinsi Sumsel, yang memiliki target pembangunan menyeluruh di semua bidang, target lainnya adalah peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, serta IPTEK dan suasana wilayah yang kondusif.

Pada 2018 Balitbangnovda Sumsel memiliki target membentuk pusat inovasi dan pelayanan Iptek di 17 kabupaten/kota. Target tersebut sangat wajar jika melihat realisasi dua tahun sebelumnya yang telah berhasil dibentuk di 6 kabupaten/kota pada 2014 dan 5 kabupaten/kota pada 2015.

“Jika kita lihat RPJMD 2013-2018, selama enam tahun, rata-rata Balitbangnovda Sumsel bisa membentuk tiga pusat inovasi dan pelayanan Iptek untuk mencapai 17 kabupaten/kota yang telah ditargetkan,” ucap Alamsyah.

Tiga pusat inovasi yang terbentuk pada 2015 yaitu Pusat Inovasi yang difokuskan ke daerah dan kabupaten. Daerah tersebut adalah Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas dan Muara Enim. kegiatan ini juga didukung oleh Balai Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Sementara itu, sampai dengan tahun 2015 Pelayanan Iptekin telah mencapai 35 persen dari 17 kabupaten yang ditetapkan sampai akhir 2018.

Keberhasilan pembentukan STP dan PI di beberapa daerah tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya di tiga kabupaten yang telah di targetkan seperti Banyuasin, Musi Rawas dan Muara Enim telah dibentuk tim SIDA (Sistem Inovasi Daerah).

Selain itu, dalam hal pengelolaan STP dan PI ditempatkan juga tenaga kerja sebagai pengelola. Faktor lainnya, keberadaan sekolah tinggi/universitas/BPP di kabupaten/kota tersebut seperti STIE, STIH, STIT Serasan di Muara Enim, Pusat Penelitian Sembawa di Banyuasin dan Universitas Musi Rawas di Musi Rawas menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan tersebut.

“Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana program/kegiatan yang mendukung tumbuhnya pusat inovasi serta dukungan dari pemerintah setempat dan BPPT juga menjadi faktor penting pembentukan STP dan PI di ketiga kabupaten tersebut,” tegas Alamsyah.

Di lain pihak, ketersediaan sarana dan dukungan pemerintah setempat juga tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah setempat untuk mendukung tumbuhnya PI, terbukti dengan ketiadaan lokasi dan gedung, sumber daya manusia, perguruan tinggi dan BPP serta anggaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Balitbangnovda harus mengurus tenaga menciptakan beberapa strategi pemecahan masalah. Beberapa strategi yang dilakukan seperti pengoptimalan sumber daya yang ada dengan cara melakukan kegiatan transfer teknologi,

memberikan pelatihan kepada SDM tentang pusat inovasi. Balitbangnovda Sumsel juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penumbuhan pusat inovasi, serta cukup gesit dalam pemberian intensif dan dana bersaing.

Selain STP dan PI Balitbangnovda Sumsel aktif dalam pelayanan Ilmu pengetahuan dan teknologi industri (Iptekin) di beberapa kabupaten/kota di Sumsel. Jumlah pelayanan Iptekin di daerah tahun 2015 berjumlah 2 kabupaten yaitu Pagaralam dan Empat Lawang.

Pemberian pelayanan Iptek tersebut merupakan hasil survey dan identifikasi intermedator berdasarkan kebutuhan UKM-UKM di kabupaten tersebut. Pelayanan Iptekin juga menunjukkan peran Balitbangnovda dalam mengajak pemerintah daerah untuk mentransfer IPTEK ke masyarakat.

Publikasi Ilmiah

Salah satu indikator produktivitas kelitbang dalam upaya peningkatan kemampuan Iptek untuk penguatan SINas (Sistem Inovasi Nasional) adalah jumlah teknologi tepat guna dan hasil-hasil kelitbang yang dipublikasikan.

Dalam hal publikasi ilmiah Balitbangnovda Sumsel memiliki dua buah jurnal ilmiah. Kedua jurnal tersebut adalah Jurnal Pembangunan Manusia yang berfokus pada tiga bidang kajian yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta Jurnal Sumber Daya Utama dan Teknologi yang berfokus di bidang pertanian, energi, dan teknologi.

Jurnal Pembangunan Manusia terbit tiga kali dalam setahun, sementara Jurnal Sumber Daya Utama terbit dua kali dalam setahun. Balitbangnovda Sumsel pun mencatat, terdapat tren peningkatan penerimaan artikel dan penerbitan jurnal selama beberapa tahun terakhir.

Menurut salah satu peneliti dan pengelola jurnal Balitbangnovda Sumsel, tren tersebut merupakan hal positif, karena dengan begitu, hasil publikasi kelitbang dapat disosialisasikan kepada masyarakat.

Tetapi, baru-baru ini pengelolaan jurnal ilmiah mengalami kendala, seiring dengan peraturan baru yang mengharuskan akreditasi jurnal melalui sistem *online*.

“Migrasi pengelolaan jurnal elektronik, selain keterbatasan pengetahuan juga membutuhkan dana yang cukup besar di awal. Baik dari pelatihan pengelolaan, ketersediaan jaringan, dan server,” terang Dian Novriadhy, peneliti dan pengelola *website*.

Pada masa mendatang Dian berharap ada semacam pelatihan dan pembinaan pengelolaan jurnal ilmiah yang lebih *intens* dari BPP Kemendagri terhadap para pengelola BPP di daerah. Menurut Dian keberadaan jurnal sangat penting tidak hanya bagi peneliti tetapi juga bagi fenomena publikasi ilmiah di Indonesia.

“Jurnal ilmiah sangat penting keberadaannya, selain untuk meningkatkan angka kredit bagi peneliti juga untuk meningkatkan peringkat publikasi ilmiah Indonesia di mata dunia,” kata Dian. (MSR)

PADA 2018 BALITBANGNOVDA SUMSEL MEMILIKI TARGET MEMBENTUK PUSAT INOVASI DAN PELAYANAN IPTEK DI 17 KABUPATEN/KOTA. TARGET TERSEBUT SANGAT WAJAR JIKA MELIHAT REALISASI DUA TAHUN SEBELUMNYA



Gedung Balitbangnovda Sumatera Selatan

Inovasi juga mendapat tantangan besar, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dua tahun terakhir yang mengalami penurunan dan dampaknya terasa di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Sumsel. Meski pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel 2015 masih di atas rata-rata nasional, tetapi rasio pertumbuhan hanya naik tipis 0,15 persen dari tahun sebelumnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,64 persen pada kuartal II 2015 melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 4,71 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan. Selain itu, citra BPP sebagai lembaga yang kurang memiliki fungsi selama ini pun, belum menunjukkan tanda-tanda membaik.



BALIBANGNOVDA SUMATERA SELATAN SAATNYA CONDONG KE INOVASI TEKNOLOGI

Besarnya harapan negara terhadap tumbuhnya pengusaha seharusnya menyadarkan berbagai kalangan, tidak terkecuali para pemangku kepentingan untuk mengubah orientasi. Di jenjang pemerintahan daerah, saatnya titik berat regulasi condong ke bidang inovasi dan teknologi mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha baru, ketimbang memperbesar lapangan kerja industri yang terkesan merusak tatanan ekologi.

Transformasi dalam teknologi dipandang menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan program penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang merupakan salah satu misi untuk mewujudkan visi Indonesia 2025 yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

Pada tahap regulasi daerah, orientasi hendaknya menitik pada kemudahan berinvestasi dan peluang mendirikan usaha bagi masyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah berusaha meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, saat ini jumlah pengusaha di Indonesia 0,8 persen. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang jumlah pengusahanya mencapai 7 persen, Thailand 3 persen, dan Malaysia 5 persen.

Peran tersebut yang kemudian ditangkap oleh Balitbangnovda Sumsel untuk berperan dalam mengembangkan inovasi daerah. Salah satu yang dilakukan oleh Balitbangnovda Sumsel adalah membentuk *technopreneur cluster* (unit alokasi pemanfaatan teknologi untuk dijadikan peluang usaha) yang dikembangkan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta desa inovasi.

Plt. Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumsel, Alamsyah mengatakan, program tersebut dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) dan diharapkan bisa melahirkan para pengusaha baru di Sumsel.

“Harapannya adalah lahir para pengusaha baru yang otomatis dapat menciptakan lapangan kerja baru di

Provinsi Sumsel, dan diharapkan juga bisa menurunkan angka pengangguran di Sumsel,” ucap Alamsyah.

Inovasi teknologi ketahanan pangan

Sejauh ini Balitbangnovda Sumsel telah berhasil merealisasikan empat jenis Inovasi di bidang teknologi ketahanan pangan dari target lima jenis inovasi. Pemetaan varietas duku dan durian Sumatera Selatan merupakan salah satu jenis inovasi yang bertujuan pengembangan dan pelestarian varietas duku dan durian.

Inovasi di bidang teknologi ketahanan pangan selanjutnya adalah mengembangkan demplot tanaman hias yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang tata cara penerapan teknologi demplot tanaman hias serta meningkatkan produktivitas pendapatan masyarakat.

Dalam hal ketahanan pangan Balitbangnovda Sumsel juga menciptakan inovasi teknologi pasca panen ikan yang menghasilkan produk *prototype* pindang patin dalam kaleng sesuai standar aman pangan dan diproduksi oleh UKM binaan Balitbangnovda, hasil kerja sama dengan LIPI dan UNSRI.

Ada pula program pembentukan difusi teknologi diversifikasi rasa kopi, yang berhasil menciptakan formula untuk kopi varian baru yaitu *palm coffee mix* (inovasi pencampuran kopi pinang dengan gula dan krimer).

Inovasi teknologi energi baru terbarukan

Sementara beberapa program yang berkaitan dengan energi baru terbarukan di antaranya, menciptakan difusi teknologi energi untuk rumah tangga yang bertujuan menyosialisasikan teknologi penyediaan energi secara

swadaya untuk keperluan rumah tangga khususnya di perdesaan.

Selain itu juga, BPP Sumsel membentuk mapping potensi sumber energi mineral batubara berbasis *Geographic Information System* (GIS) yang bertujuan membuat peta potensi sumber daya energi mineral Batubara berbasis GIS di Provinsi Sumatera Selatan.

Program tersebut juga telah berhasil menyusun peta sumber daya mineral berbasis GIS yang ada di Provinsi Sumsel yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar data sumber daya mineral Batubara untuk daerah yang memiliki potensi mineral batubara. Juga sebagai media informasi data (bank-data) sumber daya mineral yang sistematis yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi secara digital.

Inovasi teknologi transportasi

Inovasi teknologi *spare part* otomotif berbahan baku karet menjadi unggulan dalam inovasi teknologi transportasi Balitbangnovda Sumsel. Inovasi tersebut bertujuan memperoleh inovasi produk *spare part* otomotif berbahan baku karet yang sesuai kebutuhan pasar, serta dapat menumbuhkembangkan kelompok wirausaha yang menjadi sasaran intervensi program litbang iptek bidang transportasi.

Program tersebut juga menghasilkan *prototype* produk *spare part* otomotif berbahan baku karet seperti karet sok belakang mobil Panther, karet sok belakang mobil Toyota kijang, karet kap mobil Xenia/Avanza, karet *stabilizer* mobil Toyota Kijang, karet sok belakang mobil Kijang Innova dan karet foot step Honda Grand. Balitbangnovda dalam hal ini bekerja sama dengan PT. CDMI dan Yayasan Dana Bakti Astra (YDBA) milik PT Astra, yang juga telah didifusikan ke berbagai UKM dan seperti KUB Sukawinatan Bangkit dan UKM Al-Maul Khair.

Selain *spare part* otomotif juga terdapat inovasi industri kompon untuk vulkanisir hasil intermediasi Balitbangnovda dengan BPPT yang diproduksi langsung oleh salah satu UKM di Ogan Ilir.

Dalam hal Teknologi Informasi melalui inovasi teknologi informasi dan komunikasi Balitbangnovda juga telah membentuk sistem disposisi *online* untuk mewujudkan proses disposisi surat masuk yang akan didistribusikan kepada sekretariat, bidang-bidang sehingga efektif dan efisien.

Inovasi teknologi kesehatan dan obat

Inovasi teknologi ini menghasilkan beberapa kajian seperti efektivitas pemenuhan/penanggulangan defisit sayuran, telur, dan ikan untuk gizi keluarga melalui strategi pemanfaatan pekarangan. Selain itu, juga membentuk difusi teknologi pengolahan pasca panen buah untuk UKM menuju standar *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) yang menghasilkan produk turunan buah duku sebagai minuman segar, sari buah, permen *jelly* atau selai.

Inovasi dalam bidang ini juga telah menciptakan difusi teknologi pengolahan air bersih dengan tujuan merekayasa alat pengolahan air gambut menjadi air layak pakai, serta inovasi teknologi pembibitan konservasi *ex-situ* untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan yang akan menunjang program penelitian dan pengembangan iptek di bidang obat herbal. Selain itu juga menciptakan inovasi rasi (beras singkong) yang merupakan seleksi teknologi sederhana yang mudah diadopsi masyarakat untuk menghasilkan pangan olahan berbasis singkong.

Inovasi teknologi tepat guna

Salah satu inovasi yang dibentuk dalam bidang ini adalah teknologi pemanfaatan limbah kopi untuk pakan ternak yang telah diujicobakan pada kelompok tani di Kota Pagar Alam, selain itu juga telah dibentuk difusi teknologi pengolahan jagung yang menghasilkan produk tortilla dan mie jagung pada masyarakat OKU Selatan, serta difusi teknologi pengolahan pascapanen buah kolang kaling yang menghasilkan produk manisan dan minuman segar berbasis kolang kaling.

Pada bidang ini juga Balitbangnovda Sumsel membentuk difusi teknologi pascapanen buah alpukat yang bertujuan mengolah buah Alpukat menjadi *ice cream*.

Balitbangnovda Sumsel terbilang sukses dalam menciptakan inovasi berbasis teknologi, pasalnya selain beberapa produk yang dihasilkan bisa dimanfaatkan di masyarakat secara luas, Balitbangnovda Sumsel juga berperan penting terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengusaha baru berbasis lingkungan. Beberapa program tersebut juga sepatutnya menjadi contoh bagi BPP di daerah lain ketimbang hanya menengadahkan tangan menuntut belas kasihan.

Balitbangnovda Sumsel merupakan contoh BPP mandiri dan bisa dikatakan berhasil memosisikan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan proses kelitbangan pada jalur yang benar. (MSR)



BPP PROVINSI RIAU TERUS BERKEMBANG UNTUK INOVASI DAERAH

Bangunan bertingkat putih berjejer dengan bangunan kantor pemerintahan lainnya. Atas pintunya nampak unik bergaya khas Melayu, berpadu dengan warna cokelat dan kuning. Dari luar, lapangan bangunan ini begitu luas dengan tiang dan bendera merah putih berkibar dengan gagah di bawah terik hebat matahari. Memasuki ruangan, pemandangan mata akan disuguhkan dengan ruangan sempit PPID (Pusat Pelayanan Informasi Daerah) dengan cat berwarna-warni di dekat tangga menuju lantai dua, dan tiga.

Nuansa tangga berukiran batik kuning dan pegangannya bewarna hijau masih terasa khas Melayu. Kami digiring menuju tempat Kepala BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Riau, Arbaini biasa menghabiskan waktunya untuk bekerja. Jabat salam hangat dan senyumnya yang mengembang dari pipinya yang *chubby* terpancar dari perempuan yang sudah setahun menjabat orang nomor satu di BPP Riau tersebut. Kami banyak bertanya soal BPP Riau. Mulai dari pembentukan BPP Riau hingga program-program yang sudah dilaksanakan.

Awal mula

Keberadaan BPP Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau No 25 Tahun 2001 pada awal berdirinya, merupakan satuan kerja (Satker) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang memunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) yang hampir sama dengan badan-badan lainnya. "Selain itu, dulu kami memiliki tenaga fungsional peneliti sebanyak delapan orang berasal dari tenaga fungsional peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yang dialihkan Satker-nya ke BPP Provinsi Riau," ungkapinya.

Selanjutnya peraturan tersebut diubah berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008, dan terakhir kembali diubah melalui Perda No 3 Tahun 2014, tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Menurut Ibrahim Suriawan, Kepala Bidang Iptek BPP Riau, pembentukan BPP Provinsi Riau sebagai satuan kerja terpisah dari Bappeda Riau.

"Kami menunjukkan kebutuhan dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau terhadap satuan kerja yang khusus menangani tugas-tugas pemerintah Provinsi Riau di bidang penelitian dan pengembangan," kata pria yang selalu mengenakan gamis dan peci itu.

Dalam rapat terbuka tim Media BPP bersama beberapa peneliti dan Kepala Bidang, visi dan misi yang dijalankan BPP Riau, bertekad untuk menjadikan pusat riset yang melaksanakan dan mengelola kegiatan kelitbang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Seiring dengan perjalanan waktu sejak dibentuknya pada 2001 sampai sekarang, BPP Riau telah mengalami berbagai perubahan dan kemajuan. Baik dari aspek kelembagaan, program dan anggaran, serta perannya dalam memberikan masukan terhadap penetapan kebijakan pemerintah provinsi dalam pembangunan daerah di berbagai bidang.

Bisa dibilang BPP daerah ini termasuk BPP yang maju, dengan banyak program yang bermanfaat dan sesuai dengan kondisi dan keperluan masyarakat yang kaya dan melimpah akan sumber daya alamnya.



“BISA DIBILANG BPP DAERAH INI TERMASUK BPP YANG MAJU, DENGAN BANYAK PROGRAM YANG BERMANFAAT DAN SESUAI DENGAN KONDISI DAN KEPERLUAN MASYARAKAT YANG KAYA DAN MELIMPAH AKAN SUMBER DAYA ALAMNYA”

PERSONIL

Dalam melaksanakan tugasnya, tentu BPP Riau memiliki beberapa personil yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok. Setidaknya ada 76 total pegawai, terdiri dari satu sekretaris, empat kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional. Yakni, Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional suatu organisasi. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2015 Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi Riau memiliki jumlah pegawai sebanyak 88 orang, yang terdiri dari Pejabat Eselon II, 1 orang, Pejabat Eselon III, 5 orang, Pejabat Eselon IV, 10 orang, Pejabat Fungsional Peneliti 13 orang dan Staf sebanyak 59 orang.

Meski begitu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dihadapkan kepada permasalahan yang harus segera diatasi dan diselesaikan guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. "Sejauh ini, kami masih kekurangan SDM juga, terutama dalam bidang penelitian, akibatnya kita banyak bekerja sama dengan pihak ke 3 seperti universitas, kementerian lain, dan LIPI," kata Ibrahim, Kepala Bidang Iptek BPP Riau.

Setidaknya ada 11 peneliti di BPP Riau yang kepakarannya dibagi dalam empat bidang di atas. Terkadang, pemerintah setempat meminta BPP Riau untuk meneliti hal-hal yang tidak ada kepakarannya di BPP Riau. "Seperti masalah energi dan kebakaran lahan gambut kemarin, terus terang saja kami tidak ada di sini kepakarannya," kata Ibrahim.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan jumlah peneliti dengan kepakaran khusus permasalahan Riau. (IFR)

Kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah ruah di Riau menjadi negeri Madani ini terasa begitu panas dari kota-kota lainnya di Indonesia. Orang bilang langit dan bumi Riau terdiri dari minyak. Ada perkebunan kelapa sawit, hasil kebun buah dan sayur, lahan gambut, dan masih banyak lagi.

Untuk menampung semua itu, BPP Riau melakukan program unggulan pengelolaan sains sebagai pemanfaatan SDA yang ada di Riau. Program unggulan itu mereka namakan STP (*Science Techno Park*) Puribangtek (Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi).

STP PURIBANGTEK

Menurut Arbaini, pada 2002 Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengadaaan lahan seluas kurang lebih 30 Ha terletak di Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kabupaten Kampar untuk dijadikan sebagai kawasan pengembangan riset dan teknologi. “Kami punya lahan, di sana kami mengembangkan berbagai riset tentang sains tentang alga, shorgum, dan masih banyak lagi,” terang Arbaini

Tahun 2003, BPP Riau bekerja sama dengan BPPT membangun pabrik biodiesel (bahan baku CPO parit) dengan kapasitas 8 ton/hari. “Kami selesaikan itu pada 2005. Lalu di tahun yang sama, lahir lah Keputusan Gubernur Riau No Kpts. 63/11/2005, tentang Penetapan Kawasan Puribangtek. Maka jadilah STP Puribangtek ini,” katanya.

Baru pada 2008, kemudian dibangun fasilitas gedung untuk kantor pengelola kawasan Puribangtek. Saat kami mengunjunginya, tampak bangunan di dalam luas lahan 30 hektar itu sudah terisi berbagai alat dan perlengkapan yang cukup memadai, seperti mikroskop, gelas ukur, dan sebagainya.

STP Puribangtek terus berkembang pada 2011, dengan melakukan kerja sama LIPI menyusun Masterplan Riau Science and Technology Park. Pembangunan berbagai fasilitas riset (bekerja sama dengan LIPI). “Pada 2013 kami membangun Fotobioreaktor Mikroalga, lalu kami juga membangun unit pengolahan bioethanol, gedung laboratorium, lalu pada 2014 kami membuat unit pengelolaan ikan, dan rumah contoh tahan gempa yang bekerja sama dengan Litbang PU,” terang Arbaini.

Menurutnya, pada RPJMN 2015-2019 STP Puribangtek menetapkan 9 Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yakni meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi melalui Pembangunan 100

BPP PROVINSI RIAU

Program Unggulan Science Techno Park SIAP MEMAJUKAN SDA RIAU

pendayagunaan STP. “Setelah itu, Gubernur Riau mengajukan permohonan untuk dijadikan sebagai salah satu lokasi pembangunan STP melalui Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mendukung pembangunan STP,” ungkap Arbaini

Pada acara *Kick Off* Program Pembangunan 100 STP, tanggal 7 Mei 2015, di Bandung, Puribangtek Provinsi Riau ditetapkan sebagai salah satu STP yang akan dibangun melalui Kementerian Ristek dan Dikti.

PEMANFAATAN TANAMAN SORGHUM

Salah satu perkembangan yang terasa lainnya di STP adalah pemanfaatan tanaman sorghum. sorghum adalah tanaman yang sudah diuji coba di Okinawa, Jepang dan dapat dijadikan sebagai sumber energi bio etanol. Tanaman ini bentuknya mirip seperti jagung. *Nah*, karena selama ini bahan untuk bio etanol termasuk mahal atau setara harga pertamax, sorghum menjanjikan bahan bakar yang lebih murah, atau setara dengan harga premium di Indonesia

Selain itu, sorghum bisa digunakan untuk ketahanan energi karena bisa digunakan untuk bahan bio etanol. Shorgum juga dapat dikonsumsi dalam varietas tertentu. Paling tidak, ampasnya bisa digunakan untuk pakan ternak.

Dalam uji coba di lahan BPP Riau di Sei Kijang, sorghum ditanam pada lahan seluas 1.200 meter persegi dari total lahan STP (*Sains Tecno Park*) seluas 3 hektar. “Prioritas kami, sorghum untuk ketahanan pangan dan energi,” ujar Gevisioner, peneliti BPP Provinsi Riau

Pemanenan tanaman yang bisa mencapai tinggi lima meter ini hampir sama dengan tebu. Airnya digunakan untuk sumber bio etanol, sedangkan ampasnya untuk pakan ternak seperti sapi. Hasil uji coba di Okinawa, Jepang mengatakan, panen sorghum bisa 2 kali setahun. Di Indonesia, karena sinar matahari lebih stabil, maka bisa hingga tiga hingga empat kali setahun.

Begitu banyak kekayaan sumber daya mineral Riau yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat. Tidak hanya sorghum, banyak juga sumber daya mineral yang melimpah yang digunakan untuk membentuk ekonomi kreatif

di Riau. “Di kami ini sumber kekayaannya begitu melimpah, ada shorgum, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Rencananya pada 2019 nanti kita akan membuat program pengelolaan sumber daya mineral menjadi pemanfaatan tenaga listrik,” terangnya.

MIKRO ALGA, IKAN PATIN, DAN SAGU.

Selain shorgum, di dalam STP yang kami kunjungi, kami juga menemukan hasil penelitian berupa pemanfaatan mikro alga menjadi salah satu sumber protein mineral untuk makanan. Menurut Gevi, mikro alga ternyata memiliki sumber protein yang lebih banyak dari sumber energi lainnya.

Saat menyambangi kantor dan laboratoriumnya, kami melihat berbagai alat dan produk yang dihasilkan. Ada mikroskop, dispenser mini yang berisi cairan hijau, dan beberapa kardus makanan biskuit yang bekerja sama dengan universitas dan LIPI. Nama biskuit tersebut ‘*Cookies Chlorella*’. “Campuran biskuit di sini dipercaya untuk menekan gizi buruk, karena kandungan protein lebih banyak. Kami sudah melakukan uji coba di beberapa daerah yang mengalami gizi buruk,” terang Gevi.

Tidak hanya mikro alga yang dikembangkan, ada juga pengelolaan ikan yang dikemas dalam kaleng. Mereka melabelkannya dengan “Gulai Patin Khas Riau”. Meski jauh dari laut, dan hanya dikelilingi

oleh Sungai Siak, Riau memang kaya akan ikan air tawarnya, salah satunya ikan patin.

Karena ukurannya yang sangat besar, dan jumlahnya cukup banyak. BPP Riau bekerja sama dengan para mahasiswa mengelola ikan patin dalam bentuk gulai patin kaleng. Namun sayangnya, gulai patin ini hanya dikelola dalam jangka setahun. Saat kami ke sana, alat-alat seperti pemanas kaleng, kompor, bahkan beberapa hasil produknya sudah kadaluarsa. Ruang ini menjadi kosong, berdebu, bersarang laba-laba karena hanya setahun digunakan. Tidak ada yang mengelola dan tidak ada dana yang bisa dikelola. “Ya sebenarnya sayang sekali tidak ada yang mengelola. Tapi mau bagaimana lagi. Kami sudah mengusulkan untuk dipindahkan kantornya, supaya lebih dekat dengan pengawasan,” kata Gevi.

Ikan, Sawit, Sagu, dan Nanas memang empat hal yang menjadi fokus penelitian BPP Riau. Bahkan, dari sagu saja mereka sudah mampu banyak menghasilkan aneka ekonomi kreatif lainnya yang sebenarnya bisa dikembangkan. Seperti mie sagu, dan gula dari sagu. Soal kelapa sawit, jangan ditanya. Hampir sebagian kelapa sawit seluruhnya bisa digunakan untuk banyak hal. Mulai dari akarnya, hingga kelapa sawitnya. Namun sayangnya hal itu belum maksimal, masih banyak alat yang *mangkrak* karena mereka banyak bekerja sama dengan kementerian lain, dan pihak ketiga. (IFR)





Jalan Panjang Revisi UU Pilkada

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berpesan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar pelaksanaan Revisi UU Pilkada harus memikirkan tujuan jangka panjang dengan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Presiden juga berharap tidak ada perubahan lagi terkait revisi UU tersebut.

Terkait hal itu, dalam harian Kompas Tjahjo menegaskan, ada dua hal yang menjadi sikap pemerintah dalam Revisi UU Pilkada. "Pertama, hal-hal yang sudah baik dalam Pilkada serentak 2015 jangan kembali diubah. Kedua, anggota TNI/Polri, pegawai negeri sipil, dan anggota legislatif (DPR/DPD/DPRD) harus mengundurkan diri jika maju menjadi kandidat di Pilkada. Sementara bagi petahana yang kembali maju harus mengajukan cuti," kata Tjahjo.

Hingga saat ini, UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada batal disahkan. Pembatalan tersebut akibat berlarut-larutnya negosiasi politik yang terkesan lebih mementingkan posisi para politisi ketimbang perbaikan proses Pilkada. Beberapa pengamat menilai Revisi UU Pilkada lebih bernuansa memperjuangkan kepentingan pribadi, hal demikian dikarenakan pembahasan Revisi UU Pilkada selalu dilakukan tertutup.

Kepada Media Indonesia Fadli Ramadhani, peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi mengatakan, ditengah tingginya animo masyarakat terhadap isu Revisi UU Pilkada, DPR tidak mampu mengolah dengan baik ketertarikan masyarakat terhadap pilkada dan Revisi UU Pilkada.

DPR juga terus mempermasalahkan hal-hal yang dianggap tidak perlu dan sudah diatur di Mahkamah Konstitusi. "Pendekatan kepentingan

lebih kental ketimbang pendekatan evaluasi, mereka malah membahas hal-hal yang tidak perlu. soal anggota dewan mundur atau tidak mundur misalnya yang sudah di atur di MK," cetus Fadli.

Salah satu yang masih diperdebatkan di antaranya terkait praktik politik uang. DPR seolah masih setengah hati untuk memperketat aturan tersebut, dan masih didapati aturan melegalkan pemberian uang dan hadiah untuk peserta kampanye terbatas.

Setidaknya terdapat delapan aturan yang masih menjadi perdebatan UU Pilkada dan tidak kunjung disahkan DPR. Di antaranya, terkait calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2, calon petahana yang harus mundur jika mencalonkan diri di daerah lain (Pasal 7 Ayat 2 huruf p), calon dari anggota parlemen yang harus mundur ketika mencalonkan diri (Pasal 7 Ayat 2 huruf s), mengharuskan mundur dari jabatannya sebagai TNI, Polri PNS, dan Kepala Desa bagi calon dari aparat negara (Pasal 7 Ayat 2 huruf t), berhenti dari jabatannya bagi calon dari BUMN (Pasal 7 Ayat 2 huruf u).

RUU Pilkada juga mengharuskan calon yang maju dari jalur independen untuk menggunakan perbandingan jumlah DPT pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang diatur dalam pasal 41. Masalah lainnya adalah ambang batas parlemen yang mengharuskan pasangan calon harus didukung oleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara dalam pemilu DPRD, serta dalam Pasal 54C tentang pemilihan dengan satu pasangan calon. (MSR)



Pit. Kepala BPP Kemendagri bersama para peserta dalam acara siraman rohani sebelum memasuki Ramadan.



Seminar Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah membahas BUMD di Hotel Losari, Jakarta



Workshop Teknik Menulis Opini dan Feature Ilmiah Populer, di Hotel Pajajaran, Bogor, Jawa Barat.



Merevolusi Pancasila

Mendengar kata revolusi, hal yang pertama kali tergambar dalam benak pasti soal perubahan yang dilakukan secara cepat disertai dengan aksi penjarahan dan tindakan anarkis. Pengertian revolusi demikianlah yang sudah mengakar dalam pemahaman kebanyakan orang.

Hal itu terjadi karena revolusi yang dipertontonkan dalam pergelaran sejarah dunia, selalu memakan korban yang tidak sedikit. Jutaan manusia harus rela meregang nyawa menjadi korban dari kebengisan dan keegoisan seorang pemimpin yang dengan tega hati mencoba menumpas nurani kemanusiaan.

Boleh dikatakan, pemerintahan negara gagal menunaikan kewajibannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mimpi indah kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lekas menjelma menjadi mimpi buruk, tertindas, terpecah belah, terjajah, timpang, dan miskin.

Begitu pun bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat, yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, semakin dikuasai oleh orang besar kemakmuran segolongan kecil dan pihak asing. Perampasan dan perusakan sumber daya alam oleh pemodal kuat terjadi secara sistematis, masif, dan terstruktur, menyisakan malapetaka dan keterancaman kesinambungan pembangunan.

Keragaman yang mestinya memberi wahana saling mengenal, saling belajar, saling menyempurnakan untuk menguatkan persatuan justru menjadi wahana saling menyangkal, saling mengucilkan, dan saling meniadakan yang mengarah pada kelumpuhan dan kehancuran bersama.

Pada ranah politik, sebagai agen perantara dalam perubahan sistem sosial konsentrasi kekuatan nasional bagi transformasi ranah material dan mental menuju perwujudan masyarakat pancasilais yang berkekeluargaan tercabik oleh pengadopsian model demokrasi yang tidak selaras dengan dasar falsafah dan kepribadian bangsa.

Perwujudan demokrasi permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan (yang berorientasi keadilan sosial) tergegas oleh hambatan-hambatan kultural, institusional, dan struktural.

Selain itu, pengalaman Indonesia yang memiliki ketertindasan, diskriminasi, dan eksploitasi memang pantas disesali dan dimusuhi. Namun, manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan. Kebiasaan kita untuk mengutuk masa lalu dengan mengulangnya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (*regressive politics*).

Melampaui masa lalu diperlukan konsepsi patriotisme yang lebih progresif. Patriotisme yang tidak hanya bersandar pada apa yang

bisa dilawan, tetapi juga pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historisnya bukan hanya menjebol, melainkan juga membangun, memperbaiki keadaan negeri.

Apa yang harus dilakukan? Menurut Yudi Latif, dalam bukunya, yang harus dilakukan adalah dengan merevolusikan Pancasila. Dalam artian, Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai alat persatuan semata, tetapi juga harus menjadi praksis ideologis yang memiliki kekuatan nyata untuk melakukan perubahan sosial berbangsa dan bernegara.

Apa sebenarnya revolusi Pancasila? Tujuan apa yang hendak dicapainya? Lalu bagaimana penerapannya? Dalam buku ini penulis mendefinisikan revolusi Pancasila sebagai sebuah usaha untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem sosial yang meliputi ranah material, mental dan politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Melihat definisi yang demikian, Yudi seakan-akan menuntun pembaca untuk membuka kembali ingatan akan sejarah tujuan berdirinya negara ini. Jadi, revolusi Pancasila memiliki tujuan yang sama dengan tujuan kemerdekaan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurutnya, sifat revolusi Pancasila tidaklah sama dengan revolusi yang terjadi di berbagai belahan dunia mana pun. Revolusi Pancasila adalah revolusi yang khas dan unik, sebab ia merupakan gabungan dari bermacam-macam revolusi yang pernah ada. Revolusi

Amerika, Revolusi Industri, Revolusi Prancis dan Revolusi Kebudayaan di China hanyalah bergerak pada satu sisi kehidupan saja.

Sedangkan, revolusi Pancasila memiliki sifat yang kompleks dan berupaya untuk memperbaiki tatanan lama yang sudah rusak di berbagai bidang. Revolusi Pancasila adalah revolusi pancamuka atau seribu muka yang kelak akan melahirkan manusia-manusia jenis baru yang memiliki jiwa dan semangat juang revolusi Agustus, serta berupaya mewujudkan amanat penderitaan rakyat, mewujudkan masyarakat adil makmur.

Dari itu, mengais kembali prinsip-prinsip peninggalan para pendiri bangsa yang jiwa dan semangatnya tersimpan dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah solusi yang wajib dilakukan. Mengaplikasikan nilai-nilai ideal Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah bergairahnya aksi binal hedonisme, individualisme, serta kekaguman dan penghambaan akan materialisme seperti sekarang ini, memang terkesan menabrak dinding cadas dan tebal serta jalanan yang berliku.

Namun, apa yang dikatakan oleh Yudi Latif dalam buku ini bahwa kehilangan terbesar bangsa ini bukanlah kemerosotannya di bidang ekonomi serta kehilangan pemimpinnya, melainkan karena bangsa ini sudah mulai kehilangan karakter, prinsip dan harga diri kebangsaan, karena diabaikannya semangat dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya. (IFR)

PANCASILA TIDAK HANYA DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PERSATUAN SEMATA, MELAINKAN JUGA HARUS MENJADI PRAKSIS IDEOLOGIS YANG MEMILIKI KEKUATAN NYATA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SOSIAL BERBANGSA DAN BERNEGARA

Judul : Revolusi Pancasila
Penulis : Yudi Latif
Penerbit : Mizan
Halaman : 229
Harga : Rp 64.000,00
Tahun : 2015



Kisah Cinta Masa Muda BJ. Habibie

Cinta itu buta, istilah yang tepat untuk Rudy (Reza Rahadian), pemeran BJ. Habibie muda dalam film terbarunya Rudy Habibie. Meski banyak yang tidak setuju akan kedekatannya dengan wanita pilihannya dan mendapat penolakan bahkan dari orangtuannya sendiri, sosok wanita Jerman adalah sejarah yang tidak akan pernah hilang dalam benak sanubarinya.

Adalah Ilona (Chelsea Islan), sosok perempuan hangat, lincah, dan mampu mewarnai hari-hari Rudy. Gadis asal Jerman keturunan Polandia yang mengejutkan hati Rudy. Perkenalannya dimulai ketika Rudy melanjutkan sekolah di Jerman Barat. Rudy dan Ilona semakin menunjukkan kedekatannya, mereka banyak menghabiskan waktu bersama, seperti menonton konser, membaca buku, membahas puisi, hingga berdiskusi.

Di sisi lain, kedekatan dengan Ilona membuat sahabat-sahabat Rudy di lingkungan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Jerman mulai mempertanyakan tujuannya berada di Jerman. Mereka mengingatkan Rudy, keberadaannya di Jerman adalah belajar dan kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa.

Ayu adalah sahabat Rudy dalam organisasi PPI Jerman, ia yang selalu mendukung gagasan Rudy kian kontradiktif setelah mengetahui kedekatan Rudy dengan Ilona.

Hubungan Rudy dan Ilona pun pada akhirnya menemui jalan buntu, Rudy yang masih menunda kejujuran terhadap Ilona, menjadi alasan Ilona cemburu terhadap Ayu dan menganggap Rudy tidak serius mencintainya. Pertemuan Ilona dengan Mami, ibunda Rudy pun menambah daftar panjang masalah Rudy. Kejujuran Ilona terhadap Mami akan cintanya kepada Rudy rasanya tidak mungkin dipaksakan, setelah Ibunda Rudy memberikan pilihan yang sangat sulit dan berbau rasis. Perbedaan keyakinan menjadi alasan Mami untuk tidak menyetujui Ilona menjadi pendamping Rudy.

Film yang diangkat dari novel karya Gina S. Noer dengan judul Rudy Kisah Muda yang Visioner, mengangkat kisah cinta, persahabatan, dan



perjuangan BJ. Habibie ketika kuliah di Jerman. Film tersebut juga bercerita ketika BJ. Habibie terpilih menjadi ketua PPI Aachen. Program pertamanya yang gagas adalah membuat *klubraum*, sebuah tempat berkumpul dan berdiskusi yang didanai dari sumbangan teman-temannya. *Klubraum* sebagai tempat untuk menghilangkan rasa keterasingan bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman Barat. *Klubraum* juga sebagai tempat berdiskusi dengan mahasiswa Indonesia. Ia memiliki gagasan besar untuk mengadakan Seminar Pembangunan. Menurut Rudy, mahasiswa yang bersekolah di luar negeri harus memiliki rencana-rencana nyata untuk membangun Indonesia ketika mereka pulang nanti.

Para pecinta tokoh kenamaan Indonesia BJ. Habibie, aktor ternama Reza Rahadian dan Aktris cantik penuh bakat Chelsea Islan, harus bersabar dulu menunggu kehadiran film terbaru besutan Hanung Bramantyo yang merupakan Prequel dari film 'Habiebie dan Ainun', yang akan tayang pada akhir Juni mendatang.

Film yang diproduksi oleh MD Entertainment ini, diprediksi bakal mengalahkan kesuksesan film sebelumnya 'Habiebie dan Ainun'. Film tersebut masih menghadirkan sosok BJ. Habibie yang selalu ditunggu masyarakat Indonesia, pasalnya kisah cinta dan paradigma berpikirnya yang selalu menjadi Inspirasi.

Berlatar 1950an, film Rudy Habibie akan membawa penonton seperti berada di masa silam, film tersebut bercerita tentang cinta pertama mantan Presiden BJ. Habibie sebelum bertemu Ainun (Istri BJ. Habibie). Masih diperankan aktor yang sama pada

film sebelumnya 'Habiebie dan Ainun', serta mengambil lokasi syuting 70 persen di Jerman. Film tersebut sepertinya tidak hanya akan menghadirkan cerita percintaan yang menguras emosi para penonton, seperti film drama pada umumnya.

cantik blasteran Eropa, menjadi modal utama memerankan Ilona, ia hanya perlu mengubah sedikit gaya bicara yang tidak lancar berbahasa Indonesia.

Menariknya, film Rudy Habibie menampilkan

Film yang diproduksi oleh Manoj Punjabi tersebut juga menyuguhkan komedi renyah dan menghadirkan para *stand up comedian* seperti Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono, dan Boris Bokir. Selain komedi, Film Rudy Habibie juga membawa pesan moral dan menumbuhkan emosi jiwa nasionalisme, sehingga memiliki makna yang tidak sekadar hiburan.

Reza Rahadian tampil sangat menawan dengan karakter khas Habibie muda. Meski terlatih memerankan banyak karakter berbagai film yang ia bintang, profesionalismenya sebagai aktor kawakan ditunjukkan totalitas dalam film Rudy Habibie bahkan melebihi cara yang ia perankan dalam film 'Love Story' bersama Acha Septriasa dan Irwansyah. Sama halnya seperti Chelsea Islan, yang sedikit mengubah karakter sebagai seorang gadis bule. Memiliki wajah

Chelsea Islan (Kiri) dan Reza Rahadian dalam Rudy Habibie

aktng penuh emosi dari para pemain yang menjadi salah satu *scene* paling dinanti. Narasi konflik yang dihadirkan bisa menggugah empati para pecinta film drama. Beberapa adegan tersebut di antaranya, ketika Ilona meminta kejelasan kepada Rudy dan meminta persetujuan dari orang tua Rudy. Selain itu, adegan ketika konflik Ilona dimarahi Rudy.

Adegan emosi yang diperankan Reza Rahadian pun tidak kalah menarik. Khususnya saat Rudy berkonflik dengan Panca dan teman-temannya, para mantan tentara pelajar yang percaya jika Indonesia membutuhkan solusi yang berbeda dengan visi Rudy, serta saat menyatakan tegas di hadapan Ilona, ia lebih memilih Indonesia dari pada Ilona.

Sama halnya dengan kebanyakan film yang diangkat dari cerita fiksi pada umumnya, film Rudy Habibie tidak mewakili cerita novel keseluruhan. Film ini tidak diangkat dari novel best seller seperti film '5 cm', 'Ayat-Ayat Cinta', serta 'Habiebie dan Ainun'. Sehingga, akan memiliki nilai lebih ketika film ini bisa mengalahkan film sebelumnya 'Habiebie dan Ainun' yang berhasil menggaet 4 juta lebih penonton.

Film Rudy Habibie digadang-gadang bakal menjadi film terlaris tahun ini, kita lihat saja keseruan filmnya yang akan tayang pada lebaran Idul Fitri mendatang. (MSR)



RUDY HABIBIE:

Sutradara: Hanung Bramantyo

Skenario: Gina S. Noer

Pemain: Reza Rahadian, Chelsea Islan, Ernest Prakasa, Pandji Pragiwaksono, Dian nitami



Berburu Takjil:

Menjelang berbuka, Kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta dipenuhi pengunjung yang berburu takjil dan makanan. setiap Ramadan kawasan tersebut menjadi salah satu favorit pengunjung di sore hari.

YENNY SOETJIPTO | SEKJEN FITRA MENJADI PENELITI TIDAK HARUS LINIER

Senyum manis mengembang dari raut wajah perempuan asal Kediri itu. Gaya bahasanya yang khas ke Jawa Timuran menyapa kami dengan hangat. “*Piye kabare rek?*” katanya. Tidak hanya logatnya yang ke Jawa Timuran, tapi juga namanya yang khas Jawa terasa begitu kental. Yah, Yenny Soetjipto. Nama yang diberikan dari bapaknya yang berlatar belakang pendidikan hukum itu tidak sembarangan.

Kini, puterinya yang dipanggil Yenny itu tengah menjabat sebagai Sekjen sebuah LSM bernama FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Sesosok perempuan yang gemar membaca, mengkritisi dengan tajam pemerintahan yang dianggapnya tidak transparan dalam menggunakan APBN untuk keperluan masyarakat banyak.

Berkembang dari Peternakan

Media BPP memulai perbincangan dari latar belakang pendidikannya. Dengan rambut panjang diikat *cepol* sambil menyeruput es kelapa dan mencicipi jamur goreng, ibu dua anak itu mulai bercerita tentang dirinya. “Saya dulu **S**l di Brawijaya **m**engambil **J**urusan **P**eternakan,” **t**erangnya **s**ambil tertawa.

Sontak **s**eketika **s**aya

langsung kaget, biasanya orang-orang yang bergelut di LSM atau semacamnya adalah lulusan Ilmu Hukum, Ilmu Politik Pemerintahan, Ilmu Sosial, atau sejenisnya. Tapi ini peternakan? Lalu Media BPP mencoba memastikan kembali. “Iya benar peternakan, memangnya kenapa kalau peternakan? Tidak bisa jadi peneliti atau aktivis pemerintah?” kata Yenny.

Namun ternyata sekolahnya tidak sembarangan peternakan yang hanya ia geluti. Yenny justru lebih banyak aktif di organisasi ekstra kampus LKR (Lembaga Kajian Penerbitan) sejak duduk di semester satu. “Bisa dibilang memilih jurusan peternakan itu berawal dari mimpi saya di suatu malam,” ceritanya.

Ternyata, setelah lulus SMA, jurusan peternakan tidak masuk daftar keinginan Yenny kala mendaftar pada universitas ternama di Kota Malang tersebut. Semula, ia memilih Kedokteran, Ilmu Hukum, dan Perikanan. “*Nah*, pas bapak saya melihat jurusan saya itu di formulir pendaftaran, dia sudah bilang *oke* bagus. Malamnya saya bermimpi tentang ilmu peternakan, tentang bagaimana membangun bibit unggul, meningkatkan ekonomi kreatif dari peternakan. Seolah-olah dalam mimpi, saya merasa nyaman dan begitu tertarik mempelajari ilmu peternakan. Ketika bangun dari mimpi, di *last minute* pendaftaran saya ubah pilihan saya menjadi Ilmu Hukum, Peternakan, dan Perikanan. *Nah*, ternyata saya diterimanya di pilihan kedua, ya peternakan itu. Jadi saya ambil jurusan itu sebenarnya berawal dari mimpi saya. Hahahah lucu juga kalau ditanya soal itu,” celotehnya sambil tertawa.

Ketika mendapatkan jurusan peternakan, Bapak Yenny yang kebetulan berlatar belakang hukum sempat kaget mendengar kabar tersebut. “Tapi bapak saya memang orangnya demokratis, dia tidak pernah memaksa anaknya untuk harus jadi seperti yang dia inginkan,” bebernya.

Tidak pernah ada sedikit pun rasa kecewa Yenny merampungkan studinya selama 4,5 tahun di Kota Malang tersebut, justru dia bangga dengan langkah yang diambilnya. Sejak mahasiswa, dia memang sudah aktif menulis artikel, penelitian, bahkan beberapa buku yang dikerjakannya bersama kawan-kawan. Hobinya yang membaca membuat dia juga ingin ikut menciptakan bacaan untuk banyak orang. “Saya bukan orang yang hanya tahu kuliah lalu pulang, saya tidak bisa diam

hanya menerima materi pembelajaran dari kampus. Saya harus berkembang di tempat lain,” katanya.

Keaktifan itu lantas berbuah manis untuk kelulusannya. Lulus menjadi sarjana peternakan pada 2004, Yenny lantas hijrah ke Jakarta untuk mencari ilmu dan pengalaman baru. Ia bergabung dengan LSM KAH (Kolasi Anti Hutang) yang juga menyoroti APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Berbekal *paper*-nya yang sudah banyak dimuat di media massa, dengan mulus perempuan yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke 33 pada 18 Mei lalu itu, bisa bergabung di KAH. “Saya hanya sebentar di sana, yah hanya enam bulan,” selorohnya.

Selama di Koalisi Anti Hutang dan tinggal di kota metropolitan, Yenny mengaku pernah mengasong, dan tidur berpindah-pindah tempat. Mulai dari kos teman, masjid, dan apa pun yang dianggapnya bisa tidur nyenyak. “*Lah biasa toh, mbiyen neng Malang yo koyok ngono* (sudah biasa, dulu di Malang juga seperti itu-*red*),” kata Yenny.

Mulai Bergabung dengan FITRA

Mengumpulkan barang bekas dan mengamen, Ia lakukan demi bertahan hidup di Ibukota sendiri. Namun kerja kerasnya itu tidak berlangsung lama, setelah enam bulan bergelut dengan kerasnya Ibukota, Yenny mulai bergabung di FITRA pada akhir 2004. “Saat itu saya langsung menjabat koordinator analisis bidang, karena jumlah peneliti di sana juga sangat terbatas,” terangnya.

Semula, FITRA berfokus pada kajian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang tersebar di 15 provinsi, dan kebanyakan berada di luar pulau Jawa. “Karena kami rasa pemerintah selama ini tidak pernah transparan dan melaporkan pertanggungjawabannya pada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban mereka hanya vertikal, ke atasan mereka saja,” jelasnya.

Dari catatan FITRA sendiri, potensi kerugian negara banyak terlihat pada tiga bidang, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Dan pelakunya kebanyakan dari: Pertama, pejabat Eselon I, II, dan III. Kedua, Kepala Daerah, dan Ketiga, DPR,” paparnya.

FITRA kemudian mengembangkan sayapnya pada 2004 untuk berfokus juga dalam mengawal penggunaan APBN, sehingga tidak hanya berkembang pada APBD semata. Perkembangan sayap tidak hanya dirasakan oleh visi dan misi FITRA, tetapi juga pada personilnya Yenny, yang semakin berkembang karirnya di FITRA. Setiap tiga tahun sekali setidaknya Ia mengalami *upgrade* kemajuan di kariernya. “Pada 2013 sampai sekarang saya akhirnya dipilih menjadi Sekjen,” katanya.

Kode Etik FITRA

Mantan aktivis pers mahasiswa di fakultasnya itu menerangkan, meskipun sebagai LSM, FITRA mempunyai kode etik dan standar penelitian yang tidak bisa ditawar. Bekerja sama dengan *funding* luar negeri, sebagai orang nomor satu di organisasinya tersebut Yenny mengatakan dengan tegas ada batasan di mana *funding* tidak bisa membiayai penelitiannya terkait urusan dalam negeri. “Seperti UU *Tax Amnesty* kami dengan tegas menolak dibiayai *funding*. Ini masalah negara kami, negara lain harus punya batasan untuk tahu dan membiayai penelitian kami,” ungkapnya.

Menurut pengakuan Yenny, dana FITRA bahkan hanya 200 juta dalam setahun dan didapat dari uang kas masing-masing. Tidak seperti LSM lainnya, yang banyak mendapatkan bantuan dari *funding* luar negeri. “Terus terang dana kami sebenarnya hanya sedikit, tapi kami mencoba untuk mandiri dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri,” terangnya.

Tidak hanya mempunyai batasan pada *funding*, Yenny juga menegaskan untuk tidak bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Diceritakan olehnya, ada dua peneliti di daerah yang menjalankan proyek dengan APBD. “Kami itu menyoroti APBN dan APBD, masa kami ikut menggunakannya. Jika ada yang ketahuan menggunakan proyek APBN atau APBD, langsung kami pecat,” tegasnya.

Meski begitu, FITRA tetap bermitra pada instansi pemerintahan, dan banyak informan di DPR untuk memperoleh informasi dan data terutama dalam hal anggaran. “Kami boleh bekerja sama, namun hanya sebatas menjadi narasumber, pembicara dan pengarah saja. Tidak boleh sampai menjalankan proyek pemerintah,” ungkapnya.

Ditanya perihal bagaimana peneliti di instansi pemerintah, Yenny mengklaim kebanyakan para peneliti di pemerintahan tidak transparan dari program yang dijalankan. Pelaporan hanya bentuk pelaporan ke atasan, bukan ke masyarakat, dan hasil penelitiannya juga tidak terasa untuk masyarakat.

Terakhir, dia sangat berharap pada para peneliti instansi pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri untuk senantiasa aktif melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga terlahir undang-undang yang pro dan sesuai hajat hidup orang banyak. Selain itu, perlu adanya transparansi anggaran yang sudah dilakukan oleh para peneliti BPP Kemendagri. “Kalau butuh mitra, kami siap bekerja sama. Namun, maaf kami tidak bisa terlibat lebih jauh, apalagi harus menggunakan APBN,” tutupnya. (IFR)

KEBANYAKAN PARA PENELITI DI PEMERINTAHAN TIDAK TRANSPARAN DARI PROGRAM YANG DIJALANKAN. PELAPORAN HANYA BENTUK PELAPORAN KE ATASAN, BUKAN KE MASYARAKAT, DAN HASIL PENELITIANNYA JUGA TIDAK TERASA UNTUK MASYARAKAT.

Mirah Delima

Bang Amat

Oleh: Muhammad Harya
Ramdhoni

Sambeng, Solo, 21 November 1965

TIADA yang lebih membahagiakan bagi mereka di malam itu selain menangkap dalam keadaan hidup seorang buruan paling dicari oleh rezim militer yang masih berusia balita. Mereka memburunya di tepi kota Bengawan. Di suatu dusun bernama Sambeng, tak jauh dari rel kereta api yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dia-lah sasaran kebencian seisi negeri. Seseorang yang didakwa bertanggung-jawab atas pembunuhan tujuh perwira angkatan darat dua bulan sebelumnya di Jakarta. Orang-orang terdekatnya di Partai Komunis memanggilnya dengan sebutan penuh hormat: Bang Amat. Setelah berminggu-minggu kehilangan jejaknya, inilah saat yang tepat bagi mereka menangkapnya dalam keadaan masih bernyawa. Mereka telah menunggu hari ini dengan gembira. Tiada yang bisa mengalahkan sukacita ini bila mereka berhasil menangkap dan menyerahkannya ke muka pengadilan yang budiman dan berwibawa.

“Ia bersembunyi di rumah Suparto, salah seorang pekerja partainya yang taat dan rajin”, bisik sebuah suara dari dunia telik sandi nan buram dan samar-samar. Tanpa menunggu malam berganti pagi, mereka bergerak lambat namun lekas bagai hantu.

“Malam ini harus berakhir dengan penangkapan dirinya, dalam pembantaian jenderal-jenderal kita yang tercinta dan terhormat!”, seru Letnan Kolonel Ning Prayitno sang komandan operasi penangkapan. Seluruh anak buahnya mengamini. Kemudian suara mesin truk militer menderu membelah keheningan kota Solo yang diguyur hujan. Melewati pinggir wilayah para raja Mataram yang miskin dan terbelakang. Tempat di mana rakyatnya merayakan kegembiraan mereka dengan makan tiwul basi, tikus got gemuk, bangkai kucing serta sambal terasi kadaluarsa dan ikan asin.

Buruan mereka bersembunyi di sebuah rumah semi permanen. Rumah perpaduan tembok dan papan. Warna gentingnya telah luntur dimakan masa. Rumah itu tak berhalaman. Hanya sebuah teras dikelilingi beberapa pot bunga yang tak terpelihara. Sebagian pot telah pecah, juga bunga-bunganya telah layu dan mati. Rumah itu

begitu suwung dan gelap. Sebuah bohlam lima watt menyala dengan enggan di atas teras rumah. Sementara sisi lain bangunan itu terlihat gelap. Bilik-bilik tak bercahaya. Menimbulkan keraguan di hati Ning dan pasukannya. “Apakah betul ia bersembunyi di sini?”, Ning membatin dengan hati kecil yang tak yakin. Namun insting militernya berujar bahwa buruannya ada di dalam rumah itu. Bersembunyi entah di bilik sebelah mana. Bisa jadi di dalam sebuah bilik rahasia yang tak terlihat. Pengepungan senyap selepas Magrib berlanjut kepada penyerbuan. Puluhan prajurit bersenjata senapan serbu AK 47 merangsek maju, mendobrak pintu kediaman itu. Namun sial bagi mereka. Rumah itu kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hanya lampu di ruang tengah menyala lebih terang dibanding cahaya bohlam di teras depan.

“Telik sandi celaka!”, umpat Ning. Ia telah terperdaya informasi palsu. Namun bukan Ning Prayitno jika mudah menyerah. Ia perintahkan prajuritnya memeriksa seluruh ruangan di rumah itu. Tersebutlah sebuah bilik yang tak menarik dibanding ruangan lain di rumah itu. Sebuah bilik kecil diterangi cahaya bohlam samar-samar namun menyisakan bau tubuh manusia yang tertinggal. Bau keringat manusia memang khas, antara apek dan bacin. Bau yang dihasilkan gelegak darah segar di dalam seonggok daging.

“Sial! Dia lolos!”

“Saya yakin dia masih di sini, Pak. Dia belum sempat lari,” berkata Letnan Satu Sugito, salah seorang anak buah Ning.

“Dari mana kautahu?”

Sugito menunjuk sebuah meja di pojok ruangan. Sebatang rokok kretek yang baru dibakar di atas asbak. Segelas kopi panas berkepul-kepul di sampingnya.

Ning tersenyum. Gairahnya hidup kembali. Ia terlalu bernafsu hingga tak memperhatikan setiap benda di dalam ruangan itu. Sebatang rokok kretek yang a n g

baru disulut dan belum sempat dihisap. Segelas kopi panas yang belum sempat dihirup. Pertanda akan kehadiran seorang anak manusia di situ. Tapi di mana ia bersembunyi?

“Geledah ruangan ini!” perintah Ning kepada anak buahnya.

Dalam sekejap bilik kecil itu berubah serupa kapal pecah. Lemari dan ranjang menjadi santapan popor senapan dan tusukan bayonet. Kasur, bantal dan guling pun tak luput dari tusukan bayonet. Berkecai gulungan kapas dan seprai. Tapi sang buruan tak juga ditemukan.

“Di mana dia?” pekik Ning Prayitno pada Sugito.

“Sabar, Pak,” berkata Sugito, “dia masih di sini. Belum sempat melarikan diri.”

“Dugaanmu salah!” Ning berteriak penuh kegeraman.

Sugito tetap terlihat sabar dan yakin. Ia melangkah menuju lemari yang telah hancur. Dipanggilnya beberapa orang prajurit untuk membantunya. Ning memperhatikan dengan heran saat Sugito dan empat orang prajurit membongkar paksa sebuah pintu rahasia yang tertutup oleh barisan pakaian yang digantung di dalam lemari itu. Ketika pintu itu dibuka nampaklah wajah lelaki buruan mereka sedang duduk santai dengan tangan bersidekap di dalam sebuah kotak segi empat yang mirip peti mati. Ia memakai piyama. Menandakan dirinya telah siap untuk tidur. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Pandangan matanya begitu menusuk namun penuh percaya diri. Melambangkan seseorang yang penuh martabat dan harga diri.

Ning Prayitno terperangah. Keraguannya langsung sirna. Saatnya menangkap dalam keadaan hidup buronan dan musuh nomor wahid negara.

“Anda Ahmad Aidit?” tanya Ning dengan nada suara ditegaskan.

“Ya. Saya Ahmad Aidit, Menko dan Wakil Ketua MPRS!” jawabnya dengan nada suara yang lebih tegas dan angkuh.

Tak perlu banyak bicara untuk membawanya pergi dari situ. Sang ketua dinaikkan ke atas truk dan dibawa keluar kota. Konvoi truk militer itu menuju ke arah barat, ke suatu tempat kuno dan penuh rahasia dalam sejarah Jawa yang dahulu bernama Pengging.

MEREKA membawa sang tawanan ke sebuah tangsi militer di pinggir kota Boyolali. Pada masa kolonial Belanda

tangsi itu adalah rumah pengusaha Tionghoa paling kaya di kota itu. Revolusi kemerdekaan dan gerakan anti Tionghoa memaksanya angkat kaki dari rumahnya sendiri dan melarikan diri entah ke mana.

“Di sini ada sumur kering yang bapak cari,” bisik Letnan Kolonel Ning Prayitno kepada komandannya Kolonel Broto.

Broto tersenyum disertai anggukan mendengar penjelasan Ning. Alam pikirnya tengah merekayasa sebuah rencana paling liar di malam itu: membalas dendam atas pembunuhan para jenderal kepada tawannya si ketua partai komunis. Ia ingin tawannya itu mengalami penderitaan yang sama seperti dialami oleh jenderal-jenderal seniornya di Jakarta dua bulan lalu. “Aku mau ia mengalami kesakitan menjelang ajalnya, sebelum jasadnya dilemparkan bagai bangkai anjing ke dalam sumur!” kata Broto pada dirinya sendiri. Itu juga adalah perintah lisan yang didapatnya dari Jenderal Harto beberapa hari lalu. Perintah atasan dan balas dendam bersekutu mengundang kehadiran malaikat maut.

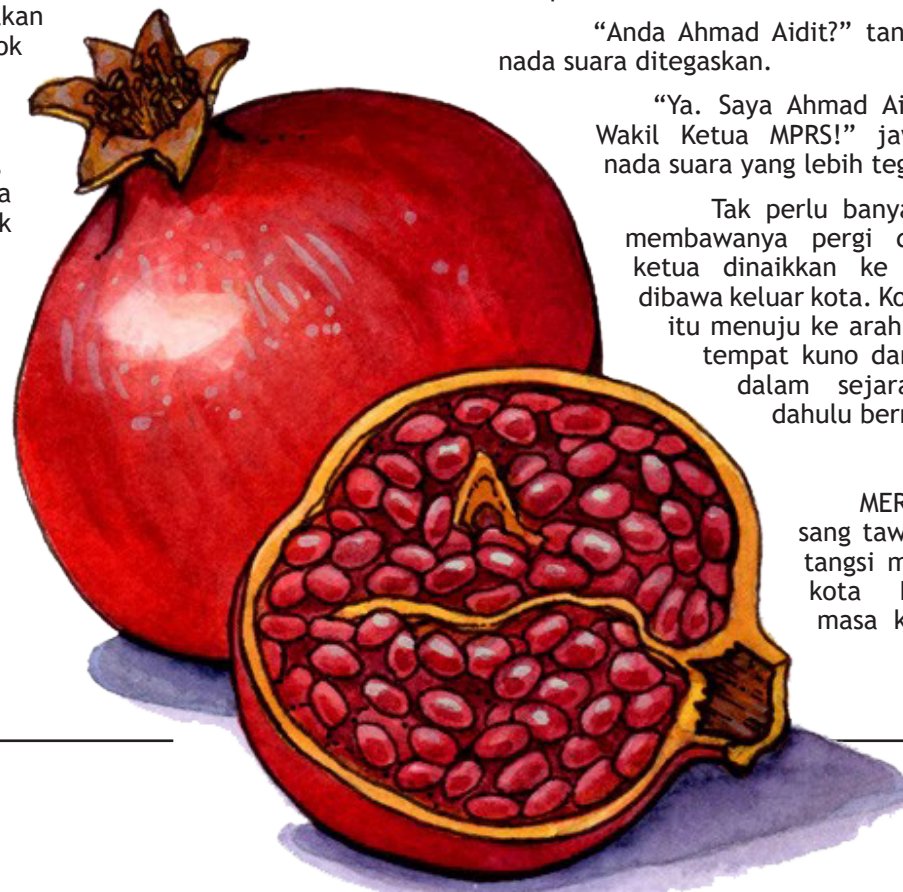
Warna gentingnya telah luntur dimakan masa. Rumah itu tak berhalaman. Hanya sebuah teras dikelilingi beberapa pot bunga yang tak terpelihara. Sebagian pot telah pecah, juga bunga-bunganya telah layu dan mati

Menjelang subuh regu tembak telah siap di halaman belakang tangsi militer di mana terletak sumur kering yang dimaksud Ning Prayitno. Sekop dan pacul tergeletak tak jauh dari situ. Dua orang prajurit menggelandang tawanan mereka ke halaman belakang. Menyadari hidupnya segera berakhir, Bang Amat dengan sisa-sisa marwah dan harga dirinya berkata:

“Kamu tahu artinya seorang Menko? Seorang Wakil Ketua MPRS dihina dengan di bawa ke tempat tak layak seperti ini? Sumur ini untuk apa?”

“Saya paham maksud Pak Ahmad. Bapak pejabat negara, ketua partai, orang besar, tokoh terkemuka dan terhormat, bapak juga orang dekat dan kepercayaan Pemimpin Besar kita. Walau begitu, bapak tetap harus mempertanggung-jawabkan perbuatan bapak kepada para jenderal dan perwira muda yang kami cintai. Dan kalau bapak mau tahu sumur ini untuk apa? Ini buat bapak. Bapak tahu bukan kalau Jenderal Yani juga dimasukkan ke dalam sumur seperti ini?” papar Broto kepada Ahmad Aidit yang telah pucat.

“Saya tidak bersalah. Penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal kalian bukan atas perintah saya,” sangkal Bang Amat dengan sisa daya perlawanan yang tak kunjung surut.



“Kalau kamu mau menembak mati saya maka, kamu juga harus menembak mati Pemimpin Besar kita!”

“Apapun alasan bapak, bapak tetap harus mati di sini di dalam sumur yang khusus digali untuk bapak. Tanpa tawar menawar,” kata Broto dengan santai.

“Baiklah, jangan tergesa-gesa. Beri kesempatan saya untuk berpidato,” berkata Bang Amat dengan suara gemetar.

Setelah sang ketua puas berpidato mengutuk setan-setan kota, setan-setan desa dan kaum nekolim serta meneriakkan “hidup Partai Komunis!” aba-aba tembak mati diteriakkan oleh Kolonel Broto dengan lantang.

Ketika pintu itu dibuka nampaklah wajah lelaki buruan mereka sedang duduk santai dengan tangan bersidekap di dalam sebuah kotak segi empat yang mirip peti mati. Ia memakai piyama. Menandakan dirinya telah siap untuk tidur. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Pandangan matanya begitu menusuk namun penuh percaya diri. Melambangkan seseorang yang penuh martabat dan harga diri.

Lima pucuk senapan AK 47 menyalak dengan ganas. Suara tembakan bersaing dengan denting selongsong peluru yang berjatuhan ke tanah. Mereka terus menembak dan menembak. Hingga peluru mereka habis tak bersisa. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bang Amat masih tegak berdiri. Ia masih bernyawa tanpa terluka sedikitpun walau piyama yang ia pakai telah koyak moyak dihajar peluru. Para penembak jitu kebingungan melihat sasaran mereka masih hidup setelah dihajar puluhan butir peluru. Sementara Broto terlihat panik menghadapi keadaan ini. Juga Ning Prayitno tak sanggup menyembunyikan keterpukauannya. “Ia kebal,” desis Ning pada dirinya sendiri.

Belum habis ketakjuban mereka, Bang Amat merogoh kantong celananya. Ia mengambil sesuatu dari dalam dompetnya. Sebuah batu berwarna merah darah seukuran kuku jari kelingking ia perlihatkan kepada para pemburunya.

“Batu mustika mirah delima!” pekik salah seorang penembak jitu.

“Rampas batu itu!” perintah Broto kepada anak buahnya. Namun terlambat. Bang Amat

menelan batu keramat itu sejurus setelah ia pamerkan kepada Broto dan seluruh prajuritnya.

Betapa geram Kolonel Broto dipermainkan oleh tawanannya. Ia bagaikan bocah ingusan yang terperdaya oleh siasat seorang tukang sulap.

“Campakkan ia hidup-hidup ke dalam sumur!” Kali ini adalah perintah penuh putus asa dari seorang komandan kepada anak buahnya.

Tubuh gempal Bang Amat dilemparkan ke dalam sumur tanpa ampun. Ia sempat meronta sekuat tenaga. Tapi tak berdaya melawan tenaga para prajurit terlatih. Suara benda berat terjatuh terdengar dari dasar sumur tak lama kemudian. Tanpa iringan suara mengaduh atau teriakan kesakitan. Bang Amat tegar dalam diamnya.

“Urug sumur itu!” Terdengar perintah pamungkas Kolonel Broto.

Dalam hitungan menit para prajurit berganti peran sebagai tukang timbun sumur. Di kejauhan azan subuh berkumandang memecah keheningan pinggiran kota Boyolali. Sambil memandangi lubang sumur yang makin tak terlihat, Broto insyaf bahwa tawanannya masih hidup dan tersudut di dasar sumur. Tak ada pilihan lain bagi dirinya di dini hari itu selain menimbun jiwa dan raga sang ketua dalam keadaan hidup. Di atas kubur tak bernisan itu para prajurit menindihnya dengan sejumlah batang pisang yang ditebang, kayu-kayu kering, dan tanah, lalu membakarnya. Tiada yang mengira bahwa disitu pernah ada sebuah sumur tua tempat seorang pembesar rezim lama dikubur hidup-hidup.

BERTAHUN-tahun kemudian saat menjabat gubernur Lampung, Kolonel Broto sering memamerkan jasanya kepada siapapun bahwa dengan tangannya sendiri telah ia bunuh pendusta Panca Sila paling berani dalam sejarah republik. Sebuah kisah keperwiraan tak tertandingi, di sebuah negeri di mana komunisme ialah jelmaan iblis penghuni neraka. Namun, diam-diam rasa masygul tak sekali dua muncul menghantuinya disebabkan kegagalannya merampas mustika mirah delima milik Bang Amat. Broto merasa dipermainkan oleh ulah sang ketua yang menelan batu itu sesaat setelah memamerkannya dengan penuh kesombongan. Bagai bocah ingusan yang gagal merebut gula-gula idamannya, itulah perasaan pahit seorang pecundang yang dirasakan Broto hingga akhir hayatnya.

Boyolali, Jawa Tengah, 15 Agustus 2015

in happy moments,
praise God.



in difficult moments,
seek God.



and
in every moments,
thank God!



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PERANANNYA TERHADAP DAERAH

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan.

TIDAK mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju umumnya terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian dan kajian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*).

Sayangnya di Indonesia, kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga *think tank* dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun lembaga litbang berperan dalam menghasilkan berbagai kajian dan penelitian, namun konsep, model, dan pilihan kebijakan yang dihasilkan masih kurang atau bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran lembaga litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tanpa melalui kajian dan litbang (*research based policy*).

Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan.

Selain itu, pada Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) juga berfungsi sebagai salah

satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya pada Pasal 388 juga menyebutkan sebagai penilaian inovasi daerah. Peraturan pelaksanaan pada tingkat Peraturan Pemerintah yang juga mengatur tentang fungsi dan peran BPP daerah, hingga saat ini juga sedang dibahas menjelang penetapan RPP OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berlandaskan UU No 23 Tahun 2014.

Pentingnya BPP juga berdasarkan alasan teoretikal. Berkaitan dengan fungsi *research & development* dalam konsep manajemen strategis yaitu peran litbang dalam melakukan *scanning* lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, BPP berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan.

Namun ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan masalah dalam upaya membangun BPP yang kuat di Indonesia. Pertama terbatasnya sumberdaya peneliti. Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di Indonesia tergolong kecil, hanya 4,7 per 10 ribu penduduk. Sementara di Malaysia ada 18 peneliti per 10 ribu penduduk, dan di negara-negara maju mencapai 80 peneliti per 10 ribu penduduk. Selain itu, jumlah peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan litbang. Misalnya di Kemendagri sendiri, hanya memiliki peneliti sebanyak 285 orang yang tersebar di pusat dan daerah (*sumber: www.lipi.go.id*). Tidak hanya itu, di Indonesia juga rendah dalam publikasi hasil litbangnya. Dilihat dari jumlah publikasi peneliti Indonesia pada jurnal-jurnal internasional hanya 522 paper, hal itu sangat jauh berbeda

jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 5781 paper, Thailand 2397 paper, dan Malaysia 1483 paper (Widodo, 2012).

Kedua, masalah dukungan anggaran untuk aktivitas litbang di Indonesia juga masih tergolong rendah. Indonesia menduduki peringkat nomor 3 terendah di dunia setelah Nikaragua dan Zambia. Tercatat pada periode 2004-2005 anggaran litbang hanya sebesar 0,05% dari Produk Domestik Bruto yang sebelumnya tersedia 0,09% pada 2012. Dukungan anggaran litbang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN seperti Singapura, yaitu sebesar 2,6% dari PDB, dan Malaysia 0,8% dari PDB. Sedangkan Jepang dan Korea masing-masing mencapai 3,4% dan 3,6% dari PDB.

Penurunan dana litbang juga terasa. Pada 2011 misalnya, dana riset berjumlah 435 miliar dari sebelumnya 453 miliar pada 2010, dan 1,2 triliun pada 2009. Jelas struktur pembiayaan penelitian demikian, tidak realistis untuk membiayai bahan, peralatan, dan gaji para peneliti yang terkesan hanya sebagai 'dana bantuan' kepada peneliti (Widodo, 2012).

Ketiga, hambatan kultural birokrasi. Rendahnya kesadaran pengambil kebijakan untuk memanfaatkan fungsi litbang dalam formulasi kebijakan berimplikasi pada munculnya persepsi di kalangan birokrat bahwa keberadaan BPP hanya sebagai pelengkap struktur kelembagaan (pusat dan daerah).

Di daerah, hingga saat ini BPP belum berperan optimal dalam mendorong pembangunan daerah. Hal itu terlihat dari sisi jumlah BPP yang berdiri sendiri hanya berada di 21 provinsi dari 34 provinsi, atau hanya ada di 39 kabupaten dari 413 kabupaten, dan 7 dari 98 kota. Jumlah ini tentu dirasa kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan daerah terhadap hasil litbang yang dapat membantu pengambil kebijakan untuk

menentukan arah pembangunan daerah. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah penting untuk membentuk BPP yang kuat sebagai komponen strategis dalam struktur pemerintahan daerah.

Selain itu, pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Pasal 208 ayat (1) keberadaan BPP sebenarnya merupakan *conditio sine qua non* *by law*. Sesuatu yang harus ada berdasarkan undang-undang. Hanya saja dalam undang-undang tersebut menjelaskan ada varian dari bentuk organisasi yang harus dibentuk berdasarkan tipe. Tipe dari kelembagaan tersebut ditentukan berdasarkan penentuan beban kerja dengan didasarkan kepada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas. Dalam kaitan itu, Undang-Undang membagi BPP menjadi Tipe A, B, dan C.

DENGAN begitu, apabila suatu norma UU sudah dirumuskan secara jelas (*expresis verbis*), maka tafsir norma harus dicukupkan (*iktifa'*) dengan makna yang jelas tersebut. Oleh karena itu BPP merupakan Badan yang

harus diwadahi dalam struktur perangkat daerah yang diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian BPP dapat melaksanakan kegiatan litbang yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan dalam menyambut era perlombaan mengejar kemajuan antarnegara di tingkat regional dan global sehingga pengambilan kebijakan terhindar dari kebiasaan yang berbasis *trial and errors*.

Dengan kehadiran BPP dalam struktur pemerintahan daerah diharapkan dapat berperan mendorong pembangunan daerah, dan menghasilkan konsep, model serta pilihan kebijakan yang akurat sebagai dasar dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di daerah.

*) Bekerja di BPP Kemendagri



Heriyandi Roni*



MENGURAI BENANG KUSUT TANAH PERBATASAN

Konflik tanah hak ulayat masyarakat Indonesia khususnya di NTT dengan warga masyarakat di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sampai saat ini masih menjadi tugas rumah pemerintah dua negara. Apabila konflik tanah ini terus mengemuka, dapat berpotensi konflik yang lebih besar antardua negara.

NAMUN sayangnya pemerintah setempat masih menganggap masalah ini sebagai masalah yang biasa, mengingat luas wilayah perbatasan yang tidak seberapa.

Jika melihat persentase perbandingan luas tanah adat di NTT di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), daerah tersebut sangatlah kecil (hanya beberapa hektar). Namun, bagi masyarakat dan kedaulatan bangsa di kawasan perbatasan tersebut, permasalahan itu sangatlah berarti untuk menentukan keberlangsungan hidup, dan potensi sumber daya alam Indonesia. Mereka berharap, pemerintah bisa belajar dari “hilangnya” Sipadan dan Ligitan beberapa waktu silam.

Secara rinci masalah-masalah terkini kawasan perbatasan RI-RDTL seperti diurai di atas, di antaranya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum lama ini penulis kunjungi, antara lain: adanya 6 (enam) titik yang berbatasan dengan Distrik Oecusse (wilayah RDTL) sampai saat ini belum disepakati dalam wilayah persetujuan lintas batas, terutama dalam kaitan dengan larangan mengelola kawasan penyangga sepanjang perbatasan yakni: (1) Bijaelsunan/Oelnasi, Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat; (2) Tubu Banat/Oben, Desa Tubu & Nilulat Kecamatan Bikomi Nilulat; (3) Nefo Nunpo, Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat; (4) Pistana, Desa Sunkaen Kecamatan Bikomi Nilulat; (5) Suni/Subina,

Desa Inbate dan Nainaban Kecamatan Bikomi Nilulat; dan (6) Bah Ob/Nellu, Desa Sunsea Kecamatan Naibenu.

Sebelumnya, pada medio November 2014 tokoh-tokoh adat di Kawasan Perbatasan RI-RDTL dengan Kefamenanu Kabupaten TTU, NTT telah mengadakan pertemuan yang menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain; Pertama, hukum internasional tidak mengenal istilah hukum adat atau pun hukum adat internasional. Dalam rangka penyelesaian masalah batas wilayah negara RI-RDTL, demi kelancaran perundingan hendaknya mulai menggunakan istilah “kearifan lokal”. Kearifan lokal mencakup makna yang lebih luas dari pada sekadar adat dan hukum adat. Dalam kearifan lokal terdapat kebijaksanaan yang memiliki nilai lintas batas dan suku.

Kedua, kearifan lokal perlu didorong agar dapat dijadikan pola penyelesaian masalah batas wilayah negara RI-RDTL. Meskipun keberadaan batas wilayah negara merupakan satu keharusan hukum, namun perundingan penetapan batas wilayah negara RI-RDTL harus dilakukan terus-menerus dengan memerhatikan kearifan lokal masyarakat perbatasan RI-RDTL.

Ketiga, di dalam perundingan penyelesaian penegasan batas antara negara RI-RDTL, terutama pada segmen un-resolved (Oben-Bijaele Sunan), dan un-surveyed (Subina-Pistana-Nefo Nunpo-Tubu Banat), hendaknya melibatkan semua unsur masyarakat perbatasan antarnegara dan kearifan lokal dari daerah-daerah setempat.

Sesuai Peta Adendum 2013 lokasi yang dianggap masih bersengketa adalah Subina, Pistana, Faut Ben (Un-surveyed Segment) ditandai dengan garis hijau tebal putus-putus

dan Bijael Sunan (Un-resolved Segment) ditandai dengan garis merah tebal. Sedangkan lokasi Nefo Nunpo hingga Tubu Banat tidak merupakan lokasi sengketa (Un-surveyed Segment, sehingga aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Desa Haumeni Ana dan Pemerintah RI terhadap pemasangan tiang listrik oleh Pemerintah RDTL hanya ditaati untuk sementara waktu untuk menghindari konflik agar tidak terjadi antarmasyarakat.

Sementara segmen batas darat yang sedang dirundingkan adalah Noel Besi-Citrana dan Bidjael Suna-Oben. Perkembangan seperti ini patut diapresiasi, hanya saja pihak Kementerian Luar Negeri RI harus menginformasikan hal ini kepada Pemerintah RDTL, sehingga terdapatnya “batu sandungan” terkait hubungan RI-RDTL dapat diminimalisasi secara dini. Selain itu, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) perlu mensosialisasikan Peta Adendum tahun 2013 kepada masyarakat TTU NTT secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten TTU, Camat, dan Desa/Lurah serta masyarakat agar terus memahami Peta Adendum 2013.

Sebenarnya kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian masih sangat kurang. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan pada November 2014 lalu tidak implementatif.

Seharusnya unsur masyarakat perlu dilibatkan karena penguasaan tanah di perbatasan sangat terkait dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Pada satu sisi, pemerintah melakukan perundingan di tingkat pemerintah, tetapi pada sisi lain masyarakat adat membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan, dan aturan pengelolaan kebun di wilayah

mereka. Tentu sangat mungkin hasilnya bertentangan dengan kesepakatan dari pemerintah dua negara.

Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat di perbatasan pemerintah Indonesia perlu membekali masyarakat dengan pendidikan yang berguna tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan nantinya. Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan



segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di NTT.

Potensi “kearifan lokal” harus diterapkan juga, selain dengan konvensi dan hukum internasional. Kewibawaan serta pengetahuan empiris tokoh adat, masyarakat, dan tokoh agama perlu digabungkan dengan “kepiawaian” dari keanggotaan tim teknis pemerintah pusat. Bila dikaitkan dengan waktu, maka akan membutuhkan beberapa tahun ke depan guna penyelesaian masalah teknis demarkasi yang diakui kedua negara tersebut. Namun, beberapa segmen wilayah yang bermasalah (*unresolved segment*) harus tetap menuntut pembicaraan lebih serius dan melibatkan pelbagai pihak di meja perundingan oleh pemerintah dua negara.

**) Peneliti Madya di BPP Kemendagri*



Djoko Sulistyono*

Ruang Gerak Calon Perseorangan

"Inilah ironi bagi calon perseorangan dalam pilkada."

Dulu, kelahirannya disambut sukacita, tetapi dalam perjalanan, ruang geraknya terus dibatasi oleh partai politik. Partai politik di negeri ini memang tidak rela kalau kavling politiknya direbut calon perseorangan. Sehingga, banyak jalan ditempuh untuk mengekang ruang gerak politik calon perseorangan.

Pembatasan ruang gerak itu secara massif tampak dari gerilya partai-partai politik di parlemen dalam membuat regulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu jalan yang ditempuh adalah merevisi UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Padahal, UU itu baru setahun berlaku sejak disahkan, namun demi libido kekuasaan harus direvisi.

Setidaknya, ada dua hal krusial dalam regulasi pilkada terkait kiprah calon perseorangan yang *dioprek-oprek* partai politik. Pertama, syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Untuk syarat dukungan pasangan calon perseorangan, disepakati paling sedikit 6,5 persen dan paling banyak 10 persen dari daftar pemilih tetap. Kedua, peningkatan verifikasi kualitas calon perseorangan. DPR dan pemerintah sepakat melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus melalui langkah menemui pendukung pasangan calon.

Detilnya, dalam Pasal 48 UU Pilkada itu diatur dua jenis verifikasi. Pertama, verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi dilakukan KPU provinsi, kabupaten atau kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua, verifikasi faktual dengan metode sensus. Dalam metode sensus tersebut, petugas PPS nantinya ditugaskan untuk menemui langsung pendukung calon perseorangan.

Sesuai Pasal 48 Ayat 3 UU Pilkada yang telah direvisi, proses verifikasi dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Jika petugas PPS tidak bisa menemui pendukung di alamatnya, tim pasangan calon harus menghadirkan pendukung tersebut ke kantor PPS dengan tenggat waktu paling lambat tiga hari. Jika tidak bisa menghadirkan, maka dukungan terhadap calon perseorangan dianggap tidak memenuhi syarat.

Partai politik di DPR berdalih, pengetatan

verifikasi administrasi terhadap pendukung calon perseorangan bertujuan untuk mencegah dukungan fiktif. Penyelenggara pilkada akan bertemu tatap muka dengan pendukung calon perseorangan untuk memeriksa syarat administrasi. DPR membantah mengajukan pengaturan itu untuk memperlemah calon perseorangan di perhelatan pilkada.

Pasal 48 UU Pilkada senyatanya mengadopsi Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Bedanya, dalam Peraturan KPU itu tidak ada batasan khusus terhadap waktu klarifikasi ke alamat pendukung. Peraturan KPU mengatur, jika pendukung tidak di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual. Sekarang, cuma tiga hari. Alhasil, tenggat verifikasi faktual yang ketat bagi pendukung calon perseorangan memicu masalah baru.

Tenggat tiga hari klarifikasi pendukung memang merupakan cara ampuh untuk menghambat munculnya pasangan calon perseorangan. Ambil contoh Pilkada DKI Jakarta. Relawan pendukung Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, kini sedang giat-giatnya mengumpulkan dukungan 1 juta KTP. Kalau merujuk UU Pilkada terbaru, berarti PPS harus bertemu langsung dengan 1 juta orang yang menyerahkan KTP untuk mendukung Basuki.

Dengan mobilitas penduduk Jakarta yang luar biasa tinggi, kemungkinan untuk bertemu dan bertatap muka tentunya menjadi sangat kecil. Ketika PPS tidak bisa menemui pemilik KTP, menjadi tanggung jawab pasangan calon untuk menghadirkan pendukung tersebut di kantor PPS. Jelas sudah, verifikasi faktual dengan metode sensus hanya menghabiskan uang.

Ketentuan itu cuma bagus pada tataran ide untuk mengantisipasi dukungan fiktif. Namun, pada tataran pelaksanaan hanya merepotkan pasangan calon, pendukung calon perseorangan, bahkan PPS sendiri. Itulah cara terselubung mengekang ruang gerak calon perseorangan.

Moh Ilham A Hamudy

BUKU! TEMAN! ORANG! BERILMU



JURNAL
BINA
PRAJA

CALL FOR PAPERS

Kami mengundang
peneliti, dosen,
dan pemerhati pemerintahan untuk
menyumbangkan
Karya Tulis Ilmiahnya
ke Jurnal Bina Praja

TEMA

Pemerintahan Dalam Negeri

Terbit
dua kali setahun
pada bulan Mei
dan November

SUBTEMA

Otonomi Daerah dan Birokrasi
Politik dan Pemerintahan
Administrasi Kewilayahan
dan Pemerintahan Desa

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi Daerah
Pembangunan dan Keuangan Daerah
Isu Pemerintahan lainnya

SYARAT & KETENTUAN - Dibuka secara umum | Naskah dapat berupa hasil penelitian maupun kajian pemikiran | Naskah harus sesuai dengan tema dan subtema yang telah ditentukan oleh Tim Redaksi Jurnal Bina Praja | Naskah yang dikirim belum dipublikasikan media lain | Panjang naskah 39000-41000 karakter (tanpa spasi) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris (lebih disukai dalam bahasa Inggris) | Sistematika dan format penulisan, lihat <http://binaprajajournal.com> | Referensi minimal 10 buah yang berasal dari sumber primer (naskah jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, dan atau laporan penelitian lainnya) | Lampirkan biodata beserta alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi

Kirimkan karya tulis ilmiah
dengan tema Pemerintahan Dalam Negeri
ke jurnalbinapraja@yahoo.com

Diterbitkan oleh:



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terindeks di:

Google
Scholar

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

Terakreditasi No. 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016